

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO BANDA ACEH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Disusun Oleh:

SUMARYONO

NIM. 018874361

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA 2014

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Banda Aceh Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumaryono

Universitas Terbuka sumaryono@yahoo.com

Kata kunci: Pengelolaan, Pelabuhan Perikanan Lampulo, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pelabuhan perikanan terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pembangunan di bidang kelautan dan perikanan memiliki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, namun pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan berupa penurunan kualitas perairan. Salah satu pelabuhan perikanan yang ada di Banda Aceh adalah Pelabuhan Perikanan Lampulo yang secara administrasi berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Pembangunan pelabuhan perikanan telah dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan dapat memajukan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan asli daerah, menganalisa langkah-langkah yang harus ditempuh guna memaksimalkan tata kelola pelabuhan serta mengkaji aspek sosial ekonomi operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo. Penelitian ini akan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah menggunakan kuisioner, observasi dan wawancara. Populasi dan sampel penelitian adalah 100 orang yang diambil secara acak atau random sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bawah Pelabuhan Perikanan Lampulo dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerima dari retribusi yang terkumpulkan tahun 2009 s/d 2013 diperlihatkan Jumlah PAD yang terkumpul pada tahun 2009 sebesar Rp 169.228.000, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 230.910.000, tahun 2011 dan 2012 menurun nilai PAD menjadi Rp 205.810.000; dan Rp 210.194.500, tahun 2013 PAD kembali meningkat menjadi dan Rp 236.856.040. Berdasarkan nilai tersebut restibusi yang berasal dari pas masuk, tambat labuh, sewa

gudang pengepakan dan pabrik es telah meningkatkan PAD. Langkah-langkah yang harus ditempuh guna memaksimalkan tata kelola Pelabuhan Perikanan Lampulo dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Aceh dan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, membangun Pelabuhan Utama (Pelabuhan Perikanan Besar setingkat PPS/PPN) sebagai Growth Center Utama (dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Aceh), membangun Pelabuhan Perikanan Pendukung (Pelabuhan Perikanan Menengah setingkat PPP) sebagai Growth Center Pendukung (dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Aceh). Pelabuhan perikanan Lampulo telah memberi pengaruh positif terhadap sosial dan ekonomi masayarakat Banda Aceh dan Aceh yaitu adanya lowongan kerja bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya. Berdasarkan analisis SWOT, pengelola pelabuhan perikanan Lampulo berada pada posisi kuadran I. Posisi ini menandakan manajemen pelabuhan perikanan yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya pengelola pelabuhan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk implementasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan perencanaan, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal untuk kemajuan pelabuhan perikanan Lampulo dimasa mendatang.

Menyarankan kepada UPTD Pelabuhan Lampulo perlu ditata kembali manajemen pengelolaan pelabuhan, kemudian perlu dilengkapi sarana dan prasarana serta mudah diakses oleh pemakai jasa. Pengembangan pelabuhan kedepan perlu membuka kran investor supaya menanamkan modalnya, sertu perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah baik material dan non material.

ABSTRACT

Analysis of Fisheries Port Management Lampulo Coast Banda Aceh in Order to Increase Revenue (PAD)

Sumaryono

The Open University sumaryono.dkp.aceh@gmail.com

Keywords: Management, Lampulo Fishery Port, Revenue (PAD)

Fishing port consists of land and waters surrounding with certain limits as the area of government and fishing business system activities which is used as a fishing boat rests, anchored, and / or unloading of fish that is equipped with the safety of shipping and fishing support activities. Development of fishing ports in the provision of facilities and infrastructure in the field of marine and fisheries development have positive and negative influences. Positive influence is the increasing prosperity of coastal communities, but the negative effect that can be caused is the decrease in water quality. One of the existing fishing port in Banda Aceh is Lampulo Fishing Port which is administered under the Department of Marine and Fisheries in Aceh province. The development of this fishing port has created a multiplier effect for growth in other economic sectors, which in turn can improve the society welfare. Development and construction of fishing ports can promote economic and increase state revenues and the original income.

This study aims to analyze the mechanism of Fishery Port Lampulo management as the center of economic growth and a source of revenue, analyze the steps that must be taken in order to maximize the port governance and socio-economic aspects of reviewing operational Lampulo Fishery Port. This study carried out in Fishing Port Lampulo Banda Aceh using descriptive qualitative method. The technique of data collection was through the distribution of questionnaires, observation and interviews. Research population and samples was 100 people taken at random sampling.

The results showed that Lampulo Fishery Port can improve resource revenue (PAD) recipient of the levy which was collected in 2009 to 2013. The total revenue collected in 2009 amounted to Rp 169.228 million, in the year 2010 increased to Rp 230.91 million, in 2011 and 2012 the value of revenue decreased to Rp 205.81 million; and Rp 210.194.500, in 2013 the revenue increased to Rp 236.856.040. Based on the value, the retribution derived from ticket entry, harbor, packing warehouse rental and ice factories had improved the PAD. The steps that must be taken in order to maximize Lampulo Fishery Port governance based on the Aceh Fishing Port Master Plan and National Fisheries Port Master Plan is that to build major Ports (Port Fishery Great level PPS / VAT) as a Primary Growth Center

(conducted and managed by the Government Aceh), build Supporting Fishery Port (Port Fisheries High-level PPP) as a Growth Center Support (conducted and managed by the Government of Aceh). Lampulo fishing port has a positive influence on the social and economic community in Banda Aceh and Aceh that is the task for the people of Banda Aceh and surrounding areas. Based on the SWOT analysis, managers of Lampulo fishing port was in the position of quadrant I. This position indicated a strong fishing port management and opportunity. Recommended strategy is progressive, meaning that the port manager in prime condition and steady so it is possible for implementations to improve services in accordance with the planning, increase growth and achieve maximum progress for Lampulo fishing port in the future.

Suggested to UPTD Port Lampulo that the port management need to be realigned, the infrastructure need to be completed and should be easily accessible to service users. Future development of the port need to open the chances for the investors to invest, it also needs attention from Sergeant central and local governments in both material and non-material.



UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCA SARJANA

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang Selatan 15418 Telp. 021-7415050, Fax.021-7415588

BIODATA MAHASISWA

Nama : Sumaryono NIM : 018874361

Tempat dan Tanggal Lahir : Banda Aceh, 27 Agustus 1961

Registrasi Pertama : 2012.1

Riwayat Pendidikan :1. SD Negeri 1 Banda Aceh

2. SMP Negeri 4 Banda Aceh

3. SPMA Lampineung, Banda Aceh

4. Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Iskandar Muda (UNIDA)

Riwayat Pekerjaan

Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kasi Informasi Pasar Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kasi Lingkungan, Pemukiman Daerah Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kasubbag Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

: Jl. Politeknik Dsn. Ujung Krueng Desa Pango Raya Alamat Tetap

No. 2 Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,

Provinsi Aceh

Telp./ HP. : 08126919090

Email : sumaryono@yahoo.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, 15418

Telp. 021-7415050, Fax.021-741558

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul:

ANALISIS PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO BANDA ACEH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dirujuk maupun di kutip telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sangsi akademik.

Banda Aceh, 3 September 2014

Yang Menyatakan,

<u>SUMARYONO, S.P</u> NIM: 018874361

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : ANALISIS PENGELOLAAN PELABUHAN

PERIKANAN LAMPULO BANDA ACEH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

Penyusun TAPM : Sumaryono, S.P NIM : 018874361

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen

Perikanan

Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Farok Afero, M.Sc

NIP. 19760610 200212 1 004

Dr. Adhi Susilo, M.Sc, Ph.D

NIP.

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister Ilmu Kelautan

Bidang Minat Manajemen Perikanan,

Direktur Program Pascasarjana,

Dr.Ir. Nurhasanah, M.Si

NIP. 19631111 198803 2 002 NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER ILMU KELAUTAN **BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama

: Sumaryono

NIM

: 018874361

Program Studi

: Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Judul TAPM

: ANALISIS PENGELOLAAN **PELABUHAN**

PERIKANAN LAMPULO BANDA ACEH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal

: Sabtu, 24 Mei 2014

Waktu

: 21.00 - 22.30

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. Enang Rusyana, MPd

Penguji Ahli

: Prof. Dr. Ari Purbayanto, MSc

Pembimbing I : Dr. Farok Afero, MSc

Pembimbing II

: Adhi Susilo, MSc, PhD

KATA PENGANTAR

بمنم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena telah menyelesaikan penulisan Proposal TAPM (Tesis) yang berjudul: Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo Banda Aceh Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari era kejahilan ke era yang penuh pencerahan.

Amma ba'du, adalah suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa proposal TAPM ini yang merupakan bagian dari persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- 2. Kepala UPBJJ- UT Banda Aceh selaku penyelanggara Program Pascasarjana;
- Pembimbing I, Dr. Farok Afero, S.Pi. M.Si dan Pembimbing II, Adhi Susilo,
 M.Sc, PhD yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk
 mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- Kabid Minat Manajemen Perikanan selaku penanggung jawab program Minat Manajemen Perikanan;

- Ibunda tercinta Markonah (Almarhumah) dan Ayahanda Salmo (Almarhum) yang telah membesarkan dan memberi kasih sayangnya, serta mendukung penulis baik moril maupun materil sehingga dapat menyusun proposal tesis ini.
- Nursilawasih, SE istriku tercinta dengan segenap perhatian dan kasih sayangnya.
- Semua anak-anakku yang telah mendukung Ayah dalam penulisan TAPM ini sampai selesai;
- 8. Sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhirul Kalam, kepada Allah jualah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Banda Aceh, Mei 2014

Sumaryono

DAFTAR ISI

		Hal	aman
ABSTRA	K		i
LEMBAI	RAN P	ERSETUJUAN	ii
LEMBA	RAN P	ENGESAHAN	iii
BIODAT	A MA	HASISWA	v
PERNYA	TAAN	V	vi
KATA PI	ENGA	NTAR	viii
DAFTAR	ISI		x
DAFTAR	GAM	BAR	xii
DAFTAR	TABI	EL	xiii
DAFTAR	LAM	PIRAN	xiv
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Perumusan Masalah	3
	C.	Tujuan Penelitian	4
	D.	Kegunaan Penelitian	4
BAB II	TIN.	JAUAN KEPUSTAKAAN	5
	A.	Kajian Teori	5
	B.	Pengelolaan Pelabuhan oleh Darah	18
	C.	Pengembangan dan Perencaan Pelabuhan	21
	D.	Kondisi Umum Perikanan Lampulo	22
	E.	Pertumbuhan Ekonomi	26
	F.	Indikator Pertumbuhan Ekonomi	29
	G.	Kelembagaan di Lampulo	31
	H.	Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan	33
	I.	Sarana dan Prasarana PPP Lampulo	35
•	J.	Analisis SWOT sebagai Analisis Strategi	36
	Κ.	Roadmap Penelitian Terdahulu	40

BAB III	ME ⁷	FODOLOGI PENELITIAN	43
	A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
	В.	Bahan dan Alat Penelitian	43
	C.	Metode Penelitian	43
	D.	Ruang Lingkup Penelitian	44
	E.	Populasi Sampel	44
	F.	Variabel Penelitian	44
	G.	Metode Pengumpulan Data	45
	H.	Metode dan Teknik Analisis Data	46
	I.	Metode dan Teknik Penyampaian Hasil Analisis Data	55
BAB IV	HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A.	Karakteristik Responden Penelitian	56
	B.	Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Lampulo	58
	C.	Mekanisme Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo	61
	D.	Memaksimalkan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan Lampulo	68
	E.	Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat dari Operasional Pelabuh	an
		Perikanan Lampulo	71
	F.	AnalisisAktivitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo	78
	G.	Analisis SWOT Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo	83
	H.	Rumusan Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Pelabuhan	95
	I.	Pembahasan Tentang Mekanisme Peningkatan Sumber	
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelabuhan Perikanan	
		Lampulo	101
BAB V	KES	IMPULAN DAN SARAN	107
	A.	Kesimpulan	107
	B.	Saran	108
DAFTAR	PUST	TAKA	109

DAFTAR GAMBAR

Hal	aman
Gambar 2.1 Lingkaran ekonomi pertama	32
Gambar 2.2 Lingkaran ekonomi kedua	33
Gambar 4.1 Lingkaran ekonomi ketiga	34
Gambar 4.1 Jumlah alat tangkap PP Lampulo	60
Gambar 4.2 Jumlah nelayan/Anak Buah Kapal (ABK) PP Lampulo pertahun	61
Gambar 4.3 Bagan organisasi dan tata kelola UPTD PP Lampulo	68
Gambar 4.4 Aktivitas pemasaran di PP Lampulo	77
Gambar 4.5 Nilai produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Lampulo	80
Gambar 4.6 Peta Posisi Kekuatan	94
Gambar 4.7 Penerimaan PAD dari UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo	103



DAFTAR TABEL

Hala	man
Tabel 2.1 Fasilitas/sarana dan prasarana PPP Lampulo	41
Tabel 4.1 Karakteristisk Responden Penelitian	56
Tabel 4.2 Jumlah armada dam alat tangkap di PP Lampulo	58
Tabel 4.3 Jumlah kapal yang berdomisili di PP Lampulo	60
Tabel 4.4 Jumlah armada perikanan tangkap, produksi perikanan dan jumlah	
nelayan tahun 2012 di Provinsi Aceh	61
Tabel 4.5 Identifikasi manajemen Pelabuhan Perikanan menurut masyarakat	65
Tabel 4.6 Identifikasi Prasarana Pelabuhan Perikanan menurut masyarakat.	66
Tabel 4.7 Identifikasi Reribusi Pelabuhan Perikanan menurut masyarakat	67
Tabel 4.8 Aspek sosial masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Lampulo	71
Tabel 4.9 Aspek ekonomi masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Lampulo	73
Tabel 4.10 Jumlah produksi ikan tahun 2006 s/d 2012	79
Tabel 4.11 Isu aktual pengelolaan Pelabuhan Perikanan	84
Tabel 4.12 Penilaian Faktor Internal	85
Tabel 4.13 Penilaian Faktor Eksternal	86
Tabel 4.14 Identifikasi FKK	87
Tabel 4.15 Komparasi Urgensi Faktor Internal	88
Tabel 4.16 Komparasi Urgensi Faktor Eksternal	89
Tabel 4.17 Nilai Dukungan Faktor Internal	90
Tabel 4.18 Nilai Dukungan Faktor Eksternal	91
Tabel 4.19 Perhitungan NK, NRK dan TNB	92
Tabel 4.20 FKK Faktor Internal	93
Tabel 4.21 FKK Faktor Eksternal	93
Tabel 4.22 Formulasi Alternatif Strategi SWOT	96
Tabel 4.23. PAD dari UPTD Lampulo	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.3.1 Flow Chat Kerangka Pikir Penelitian	110
Lampiran A.3.2 Flow Chat Tahap Penelitian	111
Lampiran A.3.3. Kuesioner Penelitian	112
Lampiran A.3.4. Peta Banda Aceh	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas lautan sebesar 5,8 juta km². Laut Indonesia memiliki hasil perikanan yang sangat besar jumlahnya yakni sekitar 6,4 juta ton/tahun (Dahuri, 2002). Demi memanfaatkan sumber daya tersebut maka dibutuhkan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikanyang kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan penangkapan sumberdaya ikan, pengembangan armada penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan produksi hasil tangkapan serta pemasaran produksi hasil tangkapan. Pemusatan lokasi tersebut memudahkan dalam pengembangan dan pembangunan serta kontrol terhadap fasilitas yang dibutuhkan.

Pelabuhan perikanan merupakan suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan dan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis, 2002). Hal ini tentunya sesuai dengan penjelasan pasal 18 UU Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan bahwa pelabuhan perikanan sebagai suatu lingkungan kerja berfungsi sebagai: (1) pusat pengembangan masyarakat nelayan, (2) tempat berlabuh kapal perikanan, (3) tempat pendaratan hasil tangkapan, (4) tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan, (5) pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan, dan (6) pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan.

Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan perikanan telah dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi pelabuhan perikanan sangat luas. Keberadaan pelabuhan perikanan dalam arti fisik, seperti kapasitas pelabuhan harus mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya sehingga pelabuhan perikanan menjadi kawasan pengembangan industri perikanan. Pelabuhan perikanan berperan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar kawasan pelabuhan. Pelabuhan perikanan dalam wilayah Aceh berjumlah 2 unit PPP dan 152 unit PPI di 18 kab/kota dengan melayani 16.519 unit armada perikanan (DKP Aceh, 2010).

Salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Aceh adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo yang melayani nelayan setiap hari dari Aceh dan luar Aceh melakukan bongkar muat ikan dan transaksi jual beli di pelabuhan tersebut. Secara administrasi Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut dipimpin oleh Kepala Pelabuhan yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala pelabuhan dibantu oleh kepala seksi pengawasan dan kepala seksi pelayanan teknis. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (PP) Lampulo belum berjalan maksimal karena prasarana yang tersedia belum mampu mendukung kegiatan operasional penangkapan ikan. PP Lampulo tidak mempunyai otonomi sendiri sehingga masih berada dibawa DKP Aceh. Beroperasinya PP Lampulo telah berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan, pedagang, masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya dan meningkatkan PAD Provinsi Aceh melalui retribusi yang dibayar oleh nelayan serta masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut akan menunjang terhadap peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan untuk peningkatan PAD di Provinsi Aceh. Mengingat pentingnya peran pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh ini maka penting untuk dilaksanakan penelitian mengenai analisa pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul "Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

B. Pernmusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1. Apakah pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo sebagai sumber pendapatan asli daerah telah berjalan maksimal?
- 2. Apa saja langkah yang harus di tempuh guna memaksimalkan tata kelola Pelabuhan Perikanan Lampulo?
- 3. Bagaimana aspek sosial ekonomi masyarakat dari operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian analisa pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh bertujuan adalah untuk:

- Menganalisa mekanisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Menganalisa langkah-langkah yang harus ditempuh guna memaksimalkan tata kelola Pelabuhan Perikanan Lampulo.
- Mengkaji aspek sosial ekonomi masyarakat dari operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- Terbangunnya kesepahaman mekanisme dan tahapan pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.
- Adanya mekanisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo sebagai referensi pengelolaan pelabuhan perikanan dalam lingkup provinsi Aceh.
- Adanya pemahaman peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar PP Lampulo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Potensi sumberdaya ikan di lautan nusantara baik diperairan toritorial ataupun perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), diperkirakan ada sekitar 6,1 juta ton ikan yang dapat ditangkap setahun. Diperkirakan pemanfaatan potensi ini sudah dilakukan sekitar 60%. Persentase ini merupakan lampu kuning karena berdasarkan tanggung jawab komitmen internasional mengenai perikanan yang dibuat Food and Agriculture Organization (FAO) dan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), hanya 80% ikan yang boleh ditangkap. Sisanya 20% sebagai tambahan produksi penangkapan ikan sepanjang tahun (Nikijuluw, 2002).

Populasi ikan adalah subjek yang sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun dan hal ini mungkin timbul karena tekanan penangkapan terhadap stok ikan dewasa serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dari larva dan anak-anak ikan. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang baik dapat dieksploitasi. Nelayan perlu mengetahui informasi daerah penangkapan ikan sehingga dapat melakukan upaya penangkapan yang efektif dan efesien (Zamawardi Ismail, 2000).

Pelabuhan merupakan elemen yang penting dalam perkembangan sosial ekonomi suatu daerah dan negara, disamping sebagai mata rantai dari sistem transportasi. Pembangunan pelabuhan perikanan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pembangunan di bidang kelautan dan perikanan memiliki pengaruh

positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan masyarakat lain yang berhubungan dengan aktivitas pelabuhan perikanan, namun pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan berupa penurunan kualitas perairan Banda Aceh yang berada di sekitar pelabuhan baik fisik, kimia maupun mikrobiologi.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan pelabuhan antara lain :1) Kebutuhan akan ruang dan lahan, 2) Perkembangan ekonomi daerah hinterland pelabuhan, 3) Perkembangan industri yang terkait dengan pelabuhan, 4) Arus dan komposisi barang yang ada dan diharapkan, 5) Tipe dan ukuran kapal, 6) Jaringan transportasi darat dan laut dengan hinterland, 7) Akses dari dan menuju laut, 8) Potensi pengembangan, 9) Aspek hidraulika dan nautika, 10) Keamanan/keselamatan dan dampak lingkungan, 11) Analisis ekonomi dan finansial, dan 12) Struktur dan fasilitas yang sudah ada (Anonymous, 2013).

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dilakukan berdasarkan zonase fasilitas darat dan laut sesuai dengan aliran aktifitas seluruh elemen pengguna (User), penempatan fasilitas-fasilitas tersebut didasarkan pada pertimbangan teknis, fungsional dan kesesuaian pola kegiatan operasional yang direncanakan. Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: (1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; (2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (3) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (4) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; (5) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya

saing; (6) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (7) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan (8) Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

I. Pelabuhan Perikanan Laut di Indonesia

Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun aspek pemasaran. Pelabuhan perikanan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu bahwa selain memiliki fasilitas-fasilitas pokok dan fasilitas fungsional yang umum seperti dermaga, breakwater, alur pelayaran dan gedung-gedung perkantoran, peralatan navigasi, bengkel dan sebagainya, haruslah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mutlak dibutuhkan bagi kelancaran aktivitas usaha perikanan seperti tempat pendaratan dan pelelangan ikan, Cold Storage, pabrik es, fishing gear workshop dan lain sebagainya (Bambang M, 1992).

Bambang M (1992), menjelaskan pelabuhan perikanan mempunyai fungsi ganda, yakni di samping memberikan perlindungan bagi kapal-kapal yang berangkat maupun mendaratkan serta berlabuh, membongkar hasil tangkapan, pengolahan dan pemasaranm juga sebagai tempat istirahat para nelayan. Adanya prasarana atau pelabuhan perikanan tersebut memungkinkan seluruh kegiatan masyarakat nelayan akan dapat dikonsentrasikan dan sekaligus pula menjadi pintu gerbang yang mempunyai dampak positif terhadap perkembangan daerah-daerah pedalaman (hinterland), dalam arti arus lalu lintas, jaring-jaring aktivitass

pemasaran dan lain-lain kegiatan dari dan ke daerah pedalam ini berjalan lebih lancar.

Baik ditinjau dari kebutuhan yang secara langsung melayani aktivitas usaha eksploitasi sumber daya lautan maupun dari segi pengembangan daerah padalaman sekitarnya maka pengadaan atau pembangunan pelabuhan perikanan sebagai suatu prasarana mutlak harus dilakukan. Pada pokoknya fungsi pelabuhan perikanan mencangkup fasilitas-fasilitas yang dapat digolongkan sebagai fasilitas dasar dan fasilitas fungsional.

Fasilitas dasar adalah fasilitas-fasilitas yang berfungsi sebagai pelindung bagi kapal-kapal sewaktu keluar masuk pelabuhan dan sewaktu berada dipelabuhan dengan berbagai aktivitasnya. Penggolongan fasilitas ini adalah:

- a) Fasilitas pelindungan: Untuk melindungi kapal-kapal terhadap gelombang, aliran arus, pasir limpahan sungai, pasang surut, gelombang pasang dan sebagainya. Bentuk konstruksi, bangunan-bangunan yang termasuk fasilitas ini adalah break water, sand groin, sea wall, sluices dan sebagainya.
- b) Fasilitas mooring: Untuk digunakan kapal-kapal berlabuh, waktu mendaratkan ikan, mempersiapkan keberangkatan berlayar, atau penambatan biasa. Termasuk fasilitas mooring antara lain adalah: quays, landing places, mooring buoys, piers, slip ways dan sebagainya.
- c) Fasilitas water side: Areal air di dalam pelabuhan bagi kepentingan kapalkapal membuang sauh dengan aman. Termasuk fasilitas ini adalah anchorages dan basin.

Fasilitas fungsional adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk keperluan kelancaran berbagai aktivitas kerja dan pelayanan di daerah pelabuhan untuk meningkatkan mutu dan memanfaatkan pelabuhan. Berbagai fasilitas yang tergolong fasilitas fungsional ini adalah:

- Fasilitas transportasi: Jalan-jalan di dalam daerah pelabuhan, jembatan, jalan kereta api dan sebagainya.
- Fasilitas navigasi: Alat-alat kelancaran navigasi keluar masuk pelabuhan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.
- c) Fasilitas daratan: Keperluan tanah/tanah untuk segera kebutuhan di pelabuhan.
- d) Fasilitas pemeliharaan: Untuk pemeliharaan kapal dan alat-alat penangkapan, misalnya dock yord, fishing gear repaiving yard, bengkel mesin kapal dan lain-lain.
- e) Fasilitas supply: Dalam hal ini adalah supply kebutuhan air dan minyak.
- f) Fasilitas handling, preserving dan processing. Fasilitas untuk menangani hasil tangkapan (catch) termasuk kedalamnya adalah fasilitas-fasilitas seperti cold storage, pabrik es, warehous, selling place dan sebagainya.
- g) Fasilitas komunikasi perikanan: Stasiun pengamatan cuacam wireless, telegraph, telephone dan sebagainya.
- Fasilitas kesejahteraan nelayan: Antara lain adalah klinik kesehatan, penginapan, tempat mandi dan sebagainya.
- Fasilitas manajemen pelabuhan: Berupa kantor-kantor, rumah jaga dan lain-lain keperluan pengelolaan pelabuhan.

- Fasilitas sanitasi: Untuk menjamin penyediaan air bersih, air minum dan manjamin pencegahan pencemaran air.
- k) Fasilitas penanganan sisa buayan minyak: Untuk menangani sisa-sisa minyak yang tak terpakai sehingga tidak menimbulkan bahaya polusi.

Menurut Bambang (1992), apabila fungsi-fungsi pelabuhan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dapat diharapkan bahwa pelabuhan perikanan ini menjadi sangat berperan dalam mensupply bahan makanan berupa ikan bagi masyarakat serta memberikan stabilitas sosial ekonomi bagi masyarakat nelayan khususnya dan masyarakat umumnya di daerah disekitar pelabuhan tersebut.

2. Pembinaan Pelabuhan Perikanan

Hingga saat ini belum ada landasan hukum yang secara tegas, jelas dan khusus yang dapat dipakai sebagai dasar pembentukan pengaturan dan pembinaan Pelabuhan Perikanan. Pemerintah dalam mengembangkan perikanan telah menempuh dua macam cara pendekatan.

a) Pengembangan prasarana pelabuhan perikanan dengan tujuan untuk merangsang perkembangan usaha perikanan di daerah yang bersangkutan untuk kemudian lebih memajukannya. Pendekatannya ini berorientasi kepada prospek perkembangan usaha penangkapan dan pengolahan serta pemasaran di masa mendatang; dengan konsekuensi bahwa pada tahap permulaannya pelabuhan yang telah dibangun tersebut balum menunjukkan fungsinya. b) Pembangunan pelabuhan perikanan di daerah-daerah yang sebelumnya telah menunjukkan usaha perikanan yang telah berkembang.

Melalui kedua pendekatan tersebut, maka pemerintah telah dan sedang mengusahakan pembangunan pelabuhan-pelabuhan sebanyak 24 buah. Kedua ini terbagi menjadi 21 buah pelabuhan perikanan pantai 2 buah perikanan Nusantara dan I buah pelabuhan perikanan Samudera.

Adapun yang dimasudkan dengan Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A) adalah pelabuhan yang diperuntukan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan dalam armada perikanan jarak jauuh sampai ke perairan Internasional mempunyai perlengkapan untuk mengolan yang sesuai dengan kapasitas handlingnya. Jumlah ikan yang didaratkan minimum 2000 ton per hari atau 73.000 ton per tahun baik untuk pemasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) adalah pelabuhan yang diperuntukan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolonglan dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEE, sesuai dengan kapasitas handling jumlah ikan yang didaratkan minimum 50 ton per hari atau 18.250 ton setahun untuk pemasaran ikan dalam Negeri dan bersifat Nasional.

Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) adalah pelabuhan yang diperuntukkan bagi kapal-kapal yang beroperasi di pantai, dan sesuai dengan kapasitas handling jumlah ikan yang didarakan minimum 20 ton per hari atau

7.300 ton setahun untuk pemasaran ikan di daerah sekitarnya maupun sebagai pengumpul produksi untuk dikirim ke Pelabuhan Perikanan Nusantara.

Pengembangan pelabuhan perikanan bukanlah semata-mata persoalan bangunan fisik belaka. Selain hambatan-hamabtan yang menyangkut penyelesaian fisik juga hambatan-hambatan lain yang bersifat non fisik, sehingga lebih dari setengah jumlah pelabuhan yang sudah berdiri belum dapat disebut operasional. Beberapa faktor penghambat pengemban gan pelabuhan antara lain disebabkan karena:

- a) Kondisi pelabuhan yang dibangun belum sesuai dengan pembentukan armada nelayan di derah yang bersangkutan.
- Sulitnya menggerakkan nelayan untuk keluar dari pelabuhan tradisioal ke pelabuhan baru.
- c) Berbagai kesultan dan faktor teknis serta faktor sosial ekonomi lain.

3. Penangkapan ikan

Alat penangkapan ikan merupakan faktor utama dalam kegiatan operasi penangkapan ikan. Macam model dan bentuk alat tangkap yang digunakan untuk operasi penangkapan ikan, sesuai dengan jenis dan tingkah laku ikan yang akan ditangkap. Alat tangkap modern akan meningkatkan hasil tangkapan, sehingga nelayan harus mengetahui teknologi atau metode penggunaan alat.

Metode penangkapan ikan di dunia ada 16 kelas, pengelompokan yang dilakukan berkaitan dengan tingkah laku ikan (Najamuddin, 2011). Pengelompokan metode penangkapan ikan tersebut adalah:

- a) Penangkapan ikan tanpa alat (wihout gear) yaitu usaha penangkapan dengan pengumpulan baik dilakukan dengan menggunakan tangan, penyelaman dan berbagai jenis binatang yang terlatih.
- b) Pangakapan ikan dengan peralatan untuk melukai (grappling and wounding geer) yaitu usaha penangkapan dengan menggunakan alat untuk melukai objek.
- c) Penangkapan ikan dengan memabukan atau pembuisan (stupefying devide) yaitu metode penangkapan dengan cara pembiusan objek dalam usaha mencegah objek untuk melarikan diri.
- d) Pancing (lines) yaitu metode penangkapan ikan dengan memikat objek dengan sesuatu yang berupa mangsanya (umpan).
- Penangkapan dengan perangkap (traps) yaitu memikat objek agar tertarik dan masuk kedalamnya.
- f) Penangkapan dengan pangkap terapung (aerial trap) yaitu jenis perangkap didasarkan pada pengetahuan bahwa beberapa jenis ikan mempunyai kemampuan untuk meloncat melewati permukaan air.
- g) Penangkapan dengan kantong jaring dengan mulut berkerangka (bag
 nets) yaitu dengan menjaring objek dari air.
- h) Penangkapan ikan dengan alat yang diseret (dragged gear) yaitu alat jaring berkantong yang dalam operasinya di seret sepanjang dasar perairan.
- Penangkapan dengan pukat (seine nets) yaitu pengoperasiannya disuatu area penangkapan dilingkari oleh jaring.

- Penangkapan dengan jaring lingkar (purse seine) yaitu alat tangkap yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan.
- Penangkapan dengan cara menggiring ikan (drive-in net) yaitu nelayan menggiring ikan kealat tangkap.
- Penangkapan dengan jaring angkat (lift nets) yaitu menarik perhatian objek untuk berkumpul di atas alat tangkap, kemudian alat tangkap diangkat.
- m) Penangkapan dengan yang ditebarkan atau dijatuhkan dari atas (falling gear) yaitu di kurung dengan alat tangkap yang di tebar atau dijatuhkan dari atas perairan.
- n) Penangkapan dengan jaring ingsang (gillnet) yaitu objek terjerat akibat menabrak alat tangkap.
- Penangkapan dengan jaring (tangle nets) yaitu menjerat objek dengan cara terpuntal.
- p) Mesin pemanen (harvesting machines) yaitu alat penangkap yang mengeluarkan objek dari suatu perairan dan memindahkan ketempat penampungan.

4. Kapal Penangkapan Ikan

Menurut Azis (1989) dalam LIPI (1998), mendefinisikan perahu/kapal tangkap adalah perahu/kapal yang digunakan pada operasi penangkapan binatang/tanaman air baik secara langsug ataupun tidak langsung. Kapal atau perahu penangkapan merupakan sarana pendukung dalam operasi penangkapan

ikan, dimana berfungsi sebagai alat transportasi di perairan. Kapal penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan kota Banda Aceh diklasifikasi sebagai berikut:

- a) Perahu tanpa motor yaitu perahu yang dalam operasionalnya menggunakan tenaga manusia untuk menjalankannya. Perahu tanpa motor berukuran kecil dan terbuat dari kayu yang dikendari oleh 2 – 3 orang nelayan.
- b) Perahu motor tempel (Jalo) yaitu perahu yang dalam operasionalnya menggunakan mesin yang diletakkan pada buritan kapal dan dapat dipindahkan. Jalo berfungsi sebagai sarana transportasi pengangkutan hasil tangkapan dari kapal perikanan yang sedang beroperasi di laut.
- c) Kapal motor yaitu kapal penangkapan ikan yang melakukan operasionalnya menggunakan motor, penempatan mesin pada ruangan mesin yang tidak dapat dipindahkan.

Nelayan Banda Aceh

Azis (1989), nelayan merupakan tenaga kerja yang bekerja pada perahu atau kapal penangkapan ikan yang terlibat langsung dalam kegiatan penangkapan ikan di laut. Nelayan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu operasional penangkapan ikan.

Azis (1989) membagi kegiatan nelayan kedalam 3 kelas, yaitu:

 a) Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.

- b) Nelayan sambilan, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerianya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.
- c) Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Nelayan Banda Aceh menggunaan alat tangkap terdiri atas alat tangkap ikan pukat (seine nets), yaitu pukat pantai (beach seine); alat tangkap jaring lingkar (surrounding nets), yaitu pukat cincin (purse seine); alat tangkap jaring ingsang, yaitu jaring ingsang hanyut (drift gill net) dan jaring klitik (shrimp gill net); alat tangkap jaring angkat (lif: net), yaitu jaring angkat yang dioperasikan dengan perahu/rakit (blanket net); alat tangkap pancing (lines), yaitu pancing tonda (troll line) dan pancing yang dioperasikan dengan tangan (hand line) (UPDT Pelabuhan Perikanan Lampulo, 2012).

Biaya Operasional Penangkapan Ikan 6.

Nelayan Banda Aceh setiap pergi melaut membutuhkan biaya operasional. Biaya operasional ditanggung oleh toke kapal dan tengkulak yang memberi modal kepada nelayan. Nelayan butuh biaya besar untuk melakukan penangkapan ikan, yaitu:

Butuh Modal Besar a)

Bisnis penangkapan ikan sendiri termasuk bisnis yang memerlukan modal besar. Untuk memulai bisnis penangkapan ikan, harus membeli kapal penangkap ikan yang tentu saja harganya tidak murah. Selanjutnya membeli alat tangkap ikan. Harga alat tangkap ikan ini pun harganya tidak murah, semakin besar alat tangkap, maka harganya akan semakin mahal.

b) Biaya operasional tinggi

Setiap kali akan melakukan penangkapan ikan. Hal yang pertama kali diperhitungkan adalah mengenai biaya operasional penangkapan ikan, meliputi persediaan bahan bakar, makanan, air tawar, es, dsb. Menangkap ikan untuk skala industri tidak hanya dilakukan dalam satu hari menangkap ikan. Mereka bisa melakukan usaha penangkapan ikan berminggu-minggu, bahkan ada yang bisa lebih dari 2 bulan tanpa melihat daratan. Selama waktu yang lama dilaut itu maka persediaan bahan makanan dan bahan bakar harus mencukupi, dan ini memerlukan biaya yang tidak murah.

c) Bisnis menangkap ikan adalah bisnis berburu

Bisnis menangkap ikan harus sesuai dengan keinginan manajemen atau pemilik usaha, maka usaha penangkapan ikan merupakan suatu bisnis dimana produk yang dihasilkan diperoleh melalui cara berburu. Dengan modal yang besar, biaya operasi yang besar, belum tahu berapa hasil tangkapan yang diperoleh, karena tidak tahu berapa jumlah sumberdaya ikan yang ada di laut. Faktor keberuntungan dalam berburu ini lebih kentara dibandingkan dengan usaha yang lain.

d) Memerlukan ilmu yang spesifik

Kemampuan teknis dalam hal operasi penangkapan ikan, olah gerak kapal, mencari fishing ground, dan hal-hal kepelautan lainnya harus dimiliki oleh para pelaku usaha penangkapan ikan. Sebelum terjun ke bisnis usaha

penangkapan ikan, maka mereka harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai dunia kepelautan, dan teknik penangkapan ikan. Karena kemampuan inilah yang dapat mendukung berhasilnya usaha penangkapan ikan.

e) Bisnis yang beresiko tinggi

Bisnis penangkapan ikan adalah bisnis berburu, dimana modal operasi dan modal ekonomi lainnya dipertaruhkan untuk memperoleh suatu produk yang belum tahu berapa jumlahnya, bahkan hanya sekedar prediksi pun belum tentu. Inilah bisnis yang beresiko tinggi dari sisi financial. Satuhal lagi kenapa bisnis ini beresiko tinggi adalah dilihat dari sisi keselamatan jiwa. Perlu kewaspadaan yang ekstra ketika anda di tengah laut, karena banyak bahaya yang mengancam jiwa yang dapat anda temui ketika di tengah laut, mulai dari tabrakan kapal, badai, ombak besar, dsb. Seratus persen berbeda dengan usaha di daratan yang terbilang lebih aman dalam hal keselamatan jiwa (www.jugglingart.org).

B. Pengelolaan Pelabuhan oleh Daerah

Pengelolaan pelabuhan, merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang kaya dan sistematis. Secara umum, masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam aturan Pelayaran, yaitu Undang-undang tentang Pelayaran No. 21 Tahun 1992. Sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh

peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001).

Fungsi Pelabuhan

Di era globalisasi dewasa ini ternyata tidak ada bangsa/negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena tidak sama sumber daya alam yang dimiliki, dan tidak sama pula kemampuan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Juga tidak sama perkembangan industri dan pertanian yang menghasilkan barang kebutuhan serta tinggi rendahnya kebudayaan dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan adanya keterbatasan masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan maka terjadi saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, melalui perdagangan internasional. Bagi negara-negara maju mengandalkan kekuatan ekonominya pada industri atau pertanian dan ada negara yang masih mengandalkan ekonominya pada sumber daya alam yang berlimpah (natual resources).

Negara industri maju membutuhkan bahan baku. Sebaliknya negaranegara berkembang yang sedang tumbuh sektor industinya membutuhkan bahan
baku di samping negara-negara dengan sumber daya alam yang berlimpah
membutuhkan pasar untuk menjual produksinya. Kondisi dan perbedaan
kebutuhan demikian telah ikut mendorong berkembangnya perdagangan antar
negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional berarti
perdagangan yang melibatkan beberapa negara yang masing-masing mempunyai
kepentingan nasional dengan peraturan perundangundangan yang berbeda. Untuk

itu diperlukan kerjasama antar negara yang bersifat bilateral yaitu persetujuan antara dua negara yang akan menghasilkan perjanjian perdagangan dua negara (bilateral trade agreement). Jika yang terlibat beberapa negara, dalam daerah tertentu, atau berdasarkan pada kepentingan yang sama maka menghasilkan perjanjian antara beberapa negara (regional trade agreement atau mulilateral trade agreement).

2. Peranan Pelabuhan

Setelah beberapa uraian tentang pengertian hal-hal yang berkaitan dengan kepelabuhanan, maka perlu diuraikan peranan pelabuhan yaitu:

- a) Untuk melayani kebutuhan perdagangan internasioni dari daerah penyangga (hinterland) tempat pelabuhan tersebut berada.
- b) Membantu berputarnya roda perdagangan dan pengembangan industri regional
- Menampung pangsa yang semakin meningkat arus lalu lintas internasional baik transhipment maupun barang masuk (inland routing)
- d) Menyediakan fasilitas transit untuk daerah penyangga (hinterland) atau daerah/negara tetangga.

Pelabuhan yang dikelola dengan efisien dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari daerah penyangga tempat pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya, perdagangan yang lancar dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin meningkat yang akan mengakibatkan perkembangan pelabuhan. Bagi negara-negara yang sedang

berkembang peranan pelabuhan dijelaskan oleh J.A Raven (Nikijuluw, 2002) bahwa pelabuhan memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi, jelas terlihat bahwa banyak negara berkembang di mana pelabuhan dapat berfungsi secara bebas dan efisien telah mencapai kemajuan yang pesat.

C. Pengembangan dan Perencanaan Pelabuhan

1. Pengembangan Pelabuhan

Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai transportasi yang menunjang roda perekonomian negara atau suatu daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Perindustrian, pertambangan, pertanian dan perdagangan pada umumnya membutuhkan jasa transportasi termasuk jasa pelabuhan. Oleh karenanya pengembangan suatu pelabuhan bukan saja untuk kepentingan pelabuhan, tetapi juga akan mempengaruhi berbagai sektor yang ditunjang.

Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian serta pertimbangan dalam pengembangan pelabuhan adalah:

- a) Pertumbuhan/perkembangan ekonomi daerah penyangga (hinterland)
 dari pelabuhan yang bersangkutan.
- b) Perkembangan industri yang terkait dengan pelabuhan
- c) Data arus (cargo flow) sekarang dan perkiraan yang akan datang serta jenis dan macam komoditi yang akan keluar masuk.
- d) Tipe dan ukuran kapal yang diperkirakan akan memasuki pelabuhan.
- e) Jaringan jalan (prasarana dan sarana angkutan dari/ke daerah penyangga.
- f) Alur masuk/keluar menuju laut.

- g) Aspek nautis dan hidraulis
- h) Dampak keselamatan dan lingkungan hidup
- i) Analisa ekonomi dan keuangan
- j) Koordinasi antara lembaga penyelenggara yang seimbang.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa betapa kompleksnya perencanaan suatu pelabuhan, sehingga memerlukan koordinasi berbagai aspek kegiatan serta melibatkan instansi yang terkait.Suatu pelabuhan tidak bisa direncanakan dan direkayasa begitu saja, baik sebagai terminal maupun untuk pelabuhan secara utuh, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan prasarana yang menghubungkan dari/ke daerah penyangga untuk mana pelabuhan tersebut dibangun.

2. Perencanaan Pelabuhan

Tinjauan pokok dari perencanaan pelabuhan harus didasarkan pada kepentingan nasional. Perencanaan harus mengetahui/mempertimbangan faktor tersebut di bawah ini sebelum mulai dengan pengembangan pelabuhan yaitu:

- a) Kondisi fisik (survey, investigation, design) dan konstruksi
- b) Pengguna jasa (port user)
- c) Perkembangan masyarakat

D. Kondisi Umum Perikanan Lampulo

Gambaran kondisi sosial ekonomi perikanan di Pelabuhan Perikanan Lampulo menggambarkan aspek-aspek yang terkat dengan tingkat perkembangan penduduk, rumah tangga nelayan, tingkat pendapatan nelayan, tingkat pendidikan nelayan, lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan kelembagaan lainnya yang terkait dengan sosial ekonomi. Propinsi Aceh merupakan salah satu propinsi yang mempunyai status khusus berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Propinsi Aceh didukung oleh suatu kawasan hinterlandland perikanan yang cukup potensial dikembangkan baik dari sisi budidaya laut, budidaya air tawar, budidaya tambak, maupun perikanan laut (perikanan tangkap) inshore maupun offshore. Potensi sumber daya perikanan tersebar di 7 wilayah kabupaten yaitu kabupaten Aceh Besar, kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, kabupaten Aceh Timur, kabupaten Aceh Singkil, kabupaten Aceh Barat, dan kabupaten Simeulue.

Potensi pengembangan sumber daya perikanan, posisi Propinsi Aceh menjadi semakin strategis menyusul posisi provinsi ini yang menghadap Samudera Hindia dan Selat Malaka. Sebagai wilayah yang memiliki garis pantai sepanjang 1.660 km² dan didukung oleh 2 (dua) jenis wilayah perairan masingmasing laut territorial seluas 320,071 km² dan laut Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 534,520 km². Luas wilayah perairan yang mendukung propinsi ini dapat menggambarkan besarnya potensi sumber daya perikanan yang tersedia untuk dikembangkan.

Posisi ini menjadi semakin startegis menyusul lokasi yang strategis diujung Barat sebagai pintu masuk dan pintu keluar dari segitiga wilayah pengembangan perdagangan Thailand, Singapura dan Aceh. Dalam jangka panjang wilayah ini akan semakin berkembang bukan saja dilihat dari segi tiga wilayah pengembangan perdagangan itu sendiri tetapi juga terdorong oleh

semakin berkembangnya wilayah perdagangan bebas Sabang maupun Pulau Batam. Dalam jangka panjang jua akan mampu menjadi pengimbang terhadap perkembangan wilayah secara internasional dan mampu bersaing dengan wilayah lainnya.

Secara politis pengembangan pelabuhan perikanan menjadi Pelabuihan Perikanan samudera di wilayah ini dapat juga menjadi penguat terhadap posisi pembangunan nasional seutuhnya, sehingga yang mendiorong terwujudnya pembangunan sektor perikanan yang bertujuan antara lain peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor. Dalam jangka panjang akan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia, baik bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan maupun pusat pertumbuhan ekonomi pada umumnya yang bernmanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

1. Iklim dan Keadaan Lingkungan

Ketinggian rata-rata di Provinsi Aceh adalah 125 m diatas permukaan laut dengan ketinggian maksimum 1.205 m. Iklim di Aceh terdapat 2 (dua) musim yaitu (1) musim kemarau yang berlangsung dari bulan April sampai September dan (2) musim penghujan dari bulan Oktober sampai Maret, dimana keadaan musim ini selalu bergeser setiap tahunnya.

Periode bergesernya musim berpengaruh terhadap penangkapan ikan nelayan. Perubahan musim ini dikenal nama Musim Barat (April s/d September) dan Musim Timur (Oktober s/d Maret). Puncak musim terjadi pada bulan Januari

s/d Maret, bulan Oktober s/d Desember. Suhu rata-rata dan curah hujan rata-rata pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah suhu/hujan rata-rata tahun 2012 di Provinsi Aceh

No	Bulan	Suhu Rata-rata (°C)	Hujan rata-rata (mm)
1	Januari	25,4	276,5
2	Februari	26,1	113,0
3	Maret	26,3	7,3
4	April	27,5	178,1
5	Mei	27,5	21,9
6	Juni	28,2	6,2
7	Juli	28,3	118,3
8	Agustus	27,2	126,8
9	September	27,3	43,5
10	Oktober	26,8	43,5
11	November	26,2	316,5
12	Desember	26,4	254,0

Sumber: Aceh Dalam Angka, 2012

2. Kondisi Demografi Lampulo

Lampulo sebuah wilayah yang terletak di dareah aliran sungai Krueng Aceh terletak tidak jauh dari ibukota Banda Aceh atau tepatnya berada pada koordinat 05° 34′ 45′ LU dan 95° 19′ 30′ BT. Sedangkan Kota Bnda Aceh terletak pada posisi 05° 30′ 45′ – 05° 35′ 16′ dan 95° 16′ 15′ – 95° 22′ 35′ BT dan memilki luas wilayah seluas 61,36 km². Secara geografis kota Banda Aceh mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Samudera Indonesia

Sebelah selatan : Kabupaten Aceh Besar

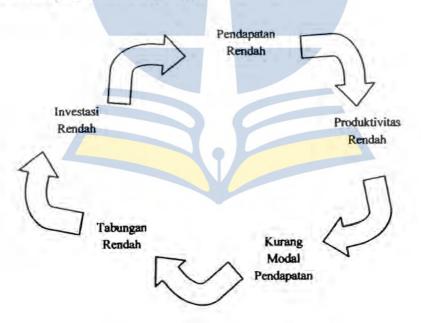
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Besar

Wilayah kampung Lampulo merupakan salah satu dari kota administrative Banda Aceh. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yang memliki 20 kelurahan dan 69 (enam puluh sembilan) desa, Wilayah Kampung Lampulo merupakan sebuah wilyah kampung yang berada di wilayah kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Propinsi Aceh.

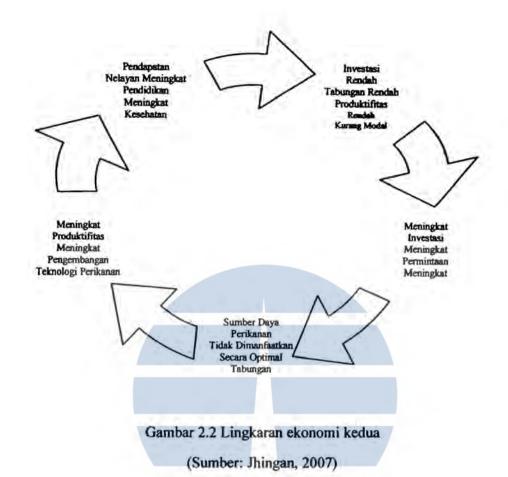
E. Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi ditafsirkan sebagai istilah yang berbeda, disamping ada juga yang menyamakan sebagai sinonim. Menurut Schumpeter dan Nyoya Ursula Hicks (dalam Arsyad, 1992) telah menarik perbedaan antara istilah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah Negara terbelakang dan pertumbuhan ekonomi mengacu pada masalah Negara maju. Perkembangan, menurut Schumpeter (dalam Arsyad, 1992) adalah perubahan spontan dan terputus dalam keadaan stationer yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan adalah perubahan iangka penjang secara perlahan dann mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Nyoya Hicks (Arsyad, 1992 dalam Dinar A, 2013) mengemukakan, masalah Negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, sekalipun penggunaannya sudah cukup duikenal, sedang masalah Negara maju terkait pada pertumbuhan, karena penggunaan sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu.

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting didalam kehidupan perekonomian. Jhingan (2007) menuturkan enam ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional/regional dengan komponennya seperti penduduk, tenaga kerja. Dua diantara enam ciri-ciri pertumbuhan adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional/regional dan pertumbuhan. Beberapa ciri-ciri pokok adanya keterbelankangan wilayah/Negara seperti adanya kemiskinan umum, sumber daya alam kurang terolah, pengangguran kelangkaan alat modal, keterbelakangan tekhnologi. Ciri-ciri tersebut dapat dianggap sebagai hambatan bagi perkembangan ekonomi. Sebagian dari ciri-ciri tersebut terkenal sebagai lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran stan pada pokonya berasal; dari fakta bahwa produktifitas total suatu wilayah/Negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna,dan keterbelakangan perekonomian yang dilukiskan pada gambar berikut.

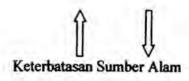


Gambar 2.1 Lingkaran ekonomi pertama (Sumber: Jhingan, 2007)



Lingkaran ketiga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam Pengembangan sumber daya alam suatu wilayah, negara tergantung kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang baik ketrampilan teknik, pengetahuan dan kewiraswastaan, maka sumber daya alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah pemanfaatannya. Pada pihak lain keterbelakangan sumberdaya alam, akan menyebabkan keterbelakangan manusia. Keterbelakangan sumber daya alam, karena itu, merupakan sebab dan merupakan sebab dan sekligus akibat keterbelakangan manusia. Untuk jelasnya dapat diikut pada gambar berikut;

Ketidak Sempurnaan Pasar





Gambar 2.3 Lingkaran ekonomi ketiga

(Sumber: Jhingan, 2007)

F. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan induikator yang dapat menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang timbul dari seluruh sector perekonomian di wilayah Kota Banda Aceh Masalah pertumbuhan dalam hal ini digunakan sebagai alat ukur terhadap laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi: laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Banda Aceh tidak berarti telah terjadinya pembangunan, tetapi kondisi ini akan memberikan gambaran terhadap proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pemakaian indikator ekonomi dilihat dalam kurun waktu tertentu dan laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan indikator perkembangan PDB dari tahun ke tahun dengan menggunakan formula berkiut.

$$\Delta PDB_{x} = \frac{PDB_{x} - PDB_{x-1}}{PDB_{x-1}} x100\% \qquad (2.3)$$

b. Laju Pertumbuhan Penduduk: Perhitungan ini dilakukan untuk dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah laju pertumbuhan penduduk semakin menguntungkan dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Sudah barang tentu prinsip ini sudah berang tentu berolak belakang dengan prinsip laju pertumbuhan ekonomi dimana justru diusahakan semakin tingggi. Laju pertumbuhan penduduk akan diukur dengan menggunakan indikator perkembangan Pertumbuhan Penduduk dari tahun ke tahun dengan menggunakan formula berikut.

$$P_{r} = P_{0}(1+r)^{n} {(2.4)}$$

Dimana P₁= Banyaknya penduduk pada akhir tahun

P = Jumlah penduduk pada awal tahun

r = angka pertumbuhan penduduk

n = periode waktu

c. Laju Produktifitas per Kapita: merupakan indicator besarnya pendapatan per kapita Pendapatan per kapita merefleksikan kemampuan yang nyata dari masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk (per kapita) atas hasil yang diperoleh.

$$.np_x = \frac{PDB_x(Rp)}{P_x} \qquad (2.5)$$

Dimana np = Nilai Produktifitas penduduk per kapita

P = Jumlah Penduduk

PDB = Produk Domestik Bruto

X = Tahun tertentu

G. Kelembagaan di Lampulo

Di wilayah PPP Lampulo terdapat dua kelembagaan yang berbeda yaitu yang bersifat adat dan yang bersifat modern.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan Adat merupakan kelembagaan yang berisafat adat dengan pola adat dan berlaku bagi warga setempat dan biasanya terjadi secara turun temurun. Oleh karena itu lembaga ini bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Wilayah Lhok merupakan satu wilayah yang dapat berupa desa pantai/pesisir, kumpulan desa pantai/pesisir (pemukiman), satu wilayah kepulauan atau kecamatan. Wilayah Lhok dipimpin oleh satu panglima yang disebut Panglima Laot Lhok. Panglima Laot Lhok dapat bertingkat dan dapat sampai pada tingkat Panglima Laot Kabupaten/Kota, dan Panglima Laot Propinsi. Beberapa tugas/fungsi Panglima Laot mempunyai cakupan yang realtif luas tetapi lebih bersifat pada terselenggarannya kepentingan adat setempat, seperti:

- Memelihara dan mengawasi terselenggaranya ketentuan hukum adat maupun adat Laot.
- Melaksanakan tugas pengawasan serta mengkoordinasikan pada tingkatan kewenangannya panglima demi terselenggaranya kegiatan/usaha penangkapan dilaut.
- Sebagai pemimpin yang mempersatukan dan menyelesaikan permesalahan-permasalahan yang timbul diantara angota masyarakat nelayan dan atau kelompok di lingkungannya.
- 4) Menyelenggarakn upacara yang berkaitan dengan upacara adat Laot.
- 5) Setiap panglima pada tingkatannya menjadi menjadi mediator baik antara pihak masyarakat adat/nelayan dengan penyelenggara pemerintahan maupun antar panglima Laot dengan panglima Laot di wilayah lain.
- Membantu program pemerintah demi tercapainya tujuan pembangunan perikanan khususnya dan pembengunan Indonesia pada umunya.
- 7) Dapat menjadi tumpuan bagi nelayan untuk mendapat modal tanpa bunga.

2. Kelembagaan Perikanan Diluar Kelembagaan Adat

Kelembagaan ini bersifat modern dan menjadi bagian dari kelembagaan pemerintah yang menjadi bagian (langsung/tidak langsung) dari lembaga pemerintahan lainnya yang mendukung dan mendorong bagi tercapainya program pemerintah khususnya pada sektor perikanan, seperti Perum PPS dan UPTD.

H. Kebijakan Bidang Perikanan dan Kelautan

Menciptakan iklim yang kondusif bagi segenap lapisan masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara rasional dan berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Menempatkan kawasan laut dan sektor perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan, rasional dan berkelanjutan dalam rangka pelestarian berbagai potensi kelautan dan pantai. Memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan laut, pesisir dan gugusan pulau-pulau di wilayah pesisir dan pantai.

I. Perikanan dan Kelautan

Visi perikanan dan kelautan adalah untuk mengelola dan memanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal yang berwawasan lingkungan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan atau petani ikan. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan/petani ikan melalui :

- a) Pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.
- b) Peningkatan kualitas SDM aparat dan masyarakat nelayan/petani ikan.
- c) Memberdayakan masyarakat pesisir dan pantai, untuk mengelola dan mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara efisien.
- d) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat nelayan/petani ikan.
- e) Pemupukan modal berusaha.

- f) Peningkatan kualitas produk perikanan.
- g) Penjalinan jaringan pemasaran yang baik.
- h) Peningkatan pelayanan keamanan dalam berusaha.

2. Strategi

Strategi pembangunan perikanan dan kelautan Kota Banda Aceh diarahkan kepada pengembangan Agribisnis Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan yang bercirikan usaha ekonomi yang tangguh, mandiri, melalui peningkatan SDM dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menetapkan batas Wilayah Kerja Laut Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
- Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kelautan dan Perikanan.
- c) Memanfaatkan sumberdaya, sarana dan SDM secara efisien dan efektif.
- Mengembangkan kerjasama horizontal dengan pihak terkait yang memiliki visi dan misi dalam pengembangan kelautan dan perikanan.
- e) Pembinaan, penertiban alat tangkap dan pembatasan mesh size lebih ditekankan pada perairan yang sudah optimal (padat tangkap) sedangkan pada daerah yang belum optimal masih terus dikembangkan.
- f) Pengembangan usaha budidaya perikanan sebagai upaya untuk peningkatan produksi, pendapatan masyarakat nelayan/petani ikan dan mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumberdaya perikanan yang berlebihan.
- g) Pemanfaatan lahan kritis untuk usaha pertambakan udang dan ikan.

- h) Menarik minat investor ke Kota Banda Aceh dengan memberikan gambaran dan data tentang potensi daerah dibidang perikanan dan kelautan serta kemudahan prosedur.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan serta memberikan rasa aman dalam berusaha dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait, disamping memfungsikan lembaga-lembaga dalam bidang Perikanan.
- Perbaikan lingkungan hutan mangrove dan pengembangan jaringan informasi yang berkaitan dengan fishing ground.

I. Sarana dan Prasarana PPP Lampulo

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo telah dimanfaatkan oleh nelayan dan pedagang di pelabuhan tersebut. Fasilitas PPP Lampulo ditampilkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Fasilitas/sarana dan prasarana PPP Lampulo

No	Jenis Fasilitas	Volume	Satuan
1.	Fasilitas Pokok		
	o Tanah	3.000	m ³
	o Alur masuk pelabuhan	1.000	m
	o Dermaga bongkar	83	m
	o Jalan komplek	180	m ³
	o Sistem drainase	1.516	M
	o Pagar keliling pelabuhan	300	M
2.	Fasilitas fungsional		
	o Gedung pelelangan ikan	480	m ³
	o Gedung pengepakan ikan	180	m ³
	o Cold storage	40	Ton/hari
	o Containerzed blok lee plan	10	Ton/hari
	o Work shop	180	m ³
	o Slipway	10	GT
	o Galangan kapal	-1-	Unit

3.	Fasilitas penunjang		
$\langle - \rangle$	Gedung kantor pelabuhan	216	m ²
	 Gedung kantor laboratorium 	432	m ²
	o Gedung pertokoan	120	m ²
	o Balai nelayan	150	m ²
	o MCK	63	m ²
	 Air bersih (Sumur bor & tower) 	5	Lt/detik
	o Areal parkir	35	m ²
	o Monumen tsunami	40	m ²
	o Generator set	150	KVA
	o SPBN	50	Ton/hari
	o Listrik dan penerangan	50	KVA

Sumber: UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, 2012

I. Analisis SWOT sebagai Analisis Strategi

Menurut Rangkuti (2005) analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah identifikasi berbagai faktor baik internal maupun eksternal secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, dalam hal ini perusahaan merupakan organisasi sektor publik/lembaga. Menurut Wheelen dan Hunger (2000) dalam Orcullo. NA (2007) penentuan strategi pengembangan masyarakat yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kondisi masyarakat dengan melihat perkembangannya selama kurun waktu tertentu, meliputi kondisi historis, kondisi saat ini dan visi ke depan. Untuk saling melengkapi diperlukan evaluasi faktor internal dan faktor ekternal yang melingkupi masyarakat tersebut. Analisis situasi merupakan awal proses perumusan strategi. Selanjutnya dinyatakan bahwa analisis situasi untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kelumahan-kelemahan internal.

Strenghts atau kekuatan adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisasi yang merupakan keunggulan komparatif sebagai faktor pendorong berkembangnya masyarakat di daerah tersebut. Faktor ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan sangat mendukung dalam pengembangan masyarakat. Weaknesses adalah kelemahan atau keterbatasan kemampuan suatu daerah yang merintangi masyarakatnya untuk berkompetisi atau berkembang. Faktor-faktor ini harus diatasi oleh masyarakat untuk dapat bergerak menuju suatu kondisi yang lebih baik dan berkembang. Apabila masyarakat tidak dapat mengatasi kelemahan yang dimilikinya maka perusahaan dapat terancam kelangsungannya.

Opportunities atau peluang adalah kondisi yang menguntungkan bagi suatu masyarakat untuk berkembang. Peluang merupakan faktor eksternal yang dihadapi masyarakat. Organisasi/perusahaan harus mampu mengidentifikasi peluang yang dihadapi serta memanfaatkannya untuk pengembangan masyarakat ke depan. Kemampuan bersaing masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana Organisasi/perusahaan mampu menciptakan inovasi, baik inovasi produk maupun jenis jasa layanan dengan melihat peluang yang ada. Threats atau ancaman adalah kondisi yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan masyarakat suatu daerah. Untuk dapat bertahan dan berkembang, masyarakat harus mampu mengatasi ancaman yang dihadapi dengan menggunakan secara optimal potensi yang dimiliki.

Wheelen dan Hunger (2000) dalam Orcullo. NA (2007) analisis SWOT harus mengidentifikasi kompetensi langka (distinctive competence) suatu daerah, yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat dan

cara unggul yang mereka gunakan. Penggunaan kompetensi langka daerah secara tepat akan memberikan keunggulan komparatif yang berkelanjutan. Satu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis (strategic factors analysis summary) sebuah daerah adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal (external factor analysis summary/EFAS) dengan faktor strategis internal (internal factors analysis summary/IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategi.

Wheelen dan Hunger (2000) dalam Orcullo. NA (2007) penggunaan bentuk ringkasan analisis faktor-faktor strategi meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- Buatlah daftar semua bagian faktor-faktor strategis yang akan dikembangkan.
- Berikanlah bobot setiap faktor dari 1,0 untuk menunjukkan faktor yang sangat penting dan 0,0 untuk menunjukkan faktor yang tidak penting berdasarkan kemungkinan dampak faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis daerah. Total bobot harus berjumlah 1,00.
- Peringkatlah setiap faktor dari nilai 5 untuk kategori sangat baik sampai dengan 1 untuk katagori sangat buruk, berdasarkan respon daerah terhadap faktor-faktor strategis tersebut.
- Kalikan setiap bobot faktor dengan peringkat untuk mendapatkan nilai bobot faktor.

Dari analisis SWOT tersebut, organisasi/perusahaan selanjutnya dapat mengkonsolidasikan faktor-faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) untuk menentukan posisi strategis suatu daerah. Dengan mengetahui posisi strategis daerah berdasarkan analisis tersebut, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan ketepatan cara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerah tersebut.

Keputusan strategi yang akan digunakan dalam pembangunan dilakukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor eksternal dan internal yang telah dinilai organisasi/perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cara-cara alternatif sehingga daerah dapat menggunakan kekuatan-kekuatan khususnya untuk menggunakan kesempatan atas peluang-peluang atau untuk menghindari ancaman dan mengatasi kelemahannya. Matrik SWOT menggambarkan bagaimana organisasi/perusahaan dapat mencocokan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi daerah dengan kekuatan dan kelemahan internalnya, untuk menghasilkan empat rangkaian alternatif strategi.

Setelah organisasi/perusahaan mampu menilai situasinya dan meninjau strategi-strategi yang tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cara-cara alternatif sehingga masyarakat dapat menggunakan kekuatan-kekuatan khususnya untuk menggunakan kesempatan atas peluang-peluang atau untuk menghindari ancaman dan mengatasi kelemahannya. Matrik SWOT menggambarkan bagaimana manajemen dapat mencocokan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan internalnya, untuk menghasilkan empat rangkaian alternatif strategi.

Di dalam memberikan rumusan strategi, ada empat strategi yang tampil dari hasil analisis SWOT (Salusu, 1996):

- Strategi SO, dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.
- Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.
- Strategi ST, akan digunakan organisasi untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar dengan memanfaatkan kekuatan yang ada.
- Strategi WT, adalah taktik pertahanan yang diarahkan pada usaha memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

J. Roadmap Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penelitian/karya ilmiah pada Universitas dan diantaranya. Pembahasan tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikaanan yang terkait dengan judul yaitu:

Tabel 2.2 Roadmap Penelitian Terdahulu

No	Judul	Personal	Materi Pembahasan
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan	Rionto C.D, 2012	Kajian tentang Pelabuhan Perikanan Pekalongan dalam perkembangannya dibidang ekonomi, khususnya Pendapatan Asli Daerah memerlukan keseimbangan antara peraturan perundang- undangan, lembaga pemerintah, otonomi daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah Pekalongan sebagai pelaksana otonomi mempunyai wewenang untuk

			Perikan Pantai Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya – Kalimatan Barat: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan teknik pengambilan data: Primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pasif, wawancara, partisipasi langsung dan studi pustaka.
5	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka	Retnowati. Endang, 2011	Kajian tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
	Otonomi Daerah		Kabupaten/Kota dalam membangun dan
			mengoperasikan Pelabuhan Perikanan serta mengelola
			Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh yang direncanakan akan menjadi kawasan industri perikanan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum. Waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah satu bulan terhitung mulai 1 s/d 31 Mei 2013.

B. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan penelitian berupa data pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun alat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah berupa kamera perekam/foto dan tabel informasi yang berisikan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Lampulo dan biaya retribusi harian, bulanan dan tahunan. Adapun keseluruhan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peta administrasi dan dokumendukomen.

C. Metode Penelitian

Mctode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan dasar bagi semua penelitian. Penelitian deskriptif dapat dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisa statistik. Data kemudian digambarkan secara detail dalam bentuk data angka, tabel, gambar, maupun kalimat hasil kuesioner dan wawancara.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang menganalisa mekanisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan asli daerah.

E. Populasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Banda Aceh dengan jumlah penduduk 257.147 jiwa (2013). Penentuan jumlah sampel yakni dengan cara acak atau random sampling/probability sampling yang mewakili populasi menggunakan persamaan rumus slovin dimana ukuran sampel minimal (n) jika diketahui ukuran populasi (N) pada taraf signifikansi α adalah:

$$n = \frac{N}{N(\alpha^2) + 1}$$

$$n = \frac{257.147}{257.147 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = 100 \, orang$$
(3.1)

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh kuesioner yang harus ditujukan yaitu sebanyak 100 (seratus) responden terdiri dari masyarakat, UPTD Lampulo dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, maka keseluruhan kuesioner yang harus disiapkan adalah 100 Kuesioner.

F. Variabel Penelitian

Variabel penelitian analisis pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh yakni:

- a) Manajemen pelabuhan perikanan Lampulo
- b) Menganalisa langkah-langkah yang ditempuh guna memaksimalkan tata kelola pelabuhan Lampulo.
- c) Sumber pertumbuhan ekonomi.

G. Metode Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

a) Data primer

Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang berpedoman pada kuesioner yang telah disiapkan. Teknik pengumpulan data dengan menyampaikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, daftar pertanyaan ini ditujukan kepada masyarakat dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pegelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo. Kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap kelompok responden yang telah ditentukan yaitu UPTD Lampulo yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional Lampulo Banda Aceh. Secara rinci jenis, sumber data dan teknik pengambilan data dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sumber data penelitian dan teknik pengumpulan data

No	Asal Responden	Jumlah	Teknik Ambil Data	Ket
1	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh	1 orang	Wawancara	Kabid Tangkap
2	UPTD Lampulo	1 orang	Wawancara	Kepala
3	Panglima Laot Banda Aceh	1 orang	Wawancara	Ketua
4	Pedagang Ikan Lampulo	10 orang	Kuisioner	Pedagang
5	Nelayan	30 orang	Kuisioner	Nelayan
6	Masyarakat Lampulo	57 orang	Kuisioner	Gp. Lampulo

b) Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik pencatatan atau perekaman terhadap laporan Pelabuhan Lampulo serta laporan-laporan lain yang berkaitan dengan penelitian baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Daftar kebutuhan dan cara memperoleh data dijabarkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar kebutuhan data penelitian

No	Data yang dibutuhkan	Sumber	Jenis Data
1	Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pelabuhan Perikanan Lampulo	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh	Sekunder
2	RTRW (Tata Ruang Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh	Sekunder
3	Kondisi Pelabuhan Perikanan Lampulo	UPTD PPS Lampulo Banda Aceh	Sekunder, Primer
4	Data terkait struktur organisasi Pengelola PPS Lampulo	UPTD PPS Lampulo Banda Aceh	Sekunder, Primer
5	Sarana dan prasarana PPS Lampulo	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh	Sekunder

H. Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode peneliti ini dilakukan dengan menggunakan dua hal, yaitu melakukan wawancara terhadap responden terpilih dan melakukan analisis pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh. Analisis deskriptif yang

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kendala dalam pengelolaan Pelabuhan Lampulo Banda Aceh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan asli daerah dan mengkaji dampak operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo dan cara penanggulangannya atau pengelolaannya. Analisis di atas merupakan gambaran bagaimana data diberlakukan dan diolah sehingga memberikan hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan serta berusaha memberikan informasi tentang pengelolaan Pelabuhan Lampulo. Analisis data itu sendiri merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

2. Analisis SWOT

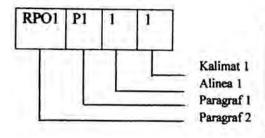
Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor baik internal maupun eksternal secara sistematis untuk merumuskan strategi pengelolaan pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh. Penilaian ini dengan menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, and Growth), yaitu 1) Urgency atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan; 2) Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak; 3) Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Perolehan data akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT,

merupakan akronim untuk kata-kata trengths!kekuatan, Weakness!Kelemahan, Opportunities!Peluang, dan Threats/ancaman.

Menurut Rangkuti (2005) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor baik internal maupun eksternal secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, dalam hal ini perusahaan merupakan organisasi sektor publik/lembaga. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh dari dalam sistem organisasi sektor publik/lembaga yang biasanya dapat dikendalikan, dapat berupa kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sistem yang berpengaruh dalam organisasi sektor publik/lembaga, dapat berupa peluang dan ancaman. Adapun alur dalam teknik analisis data ini dijelaskan melalui langkah berikut ini:

a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi isu-isu yang muncul diperoleh melalui observasi dokumen dan kutipan hasil wawancara. Hasil wawancara berupa jawaban responden dinarasikan kembali sebagai catatan sesuai urutan pertanyaan pada panduan wawancara. Untuk memudahkan pengambilan kutipan hasil wawancara, Wahyudi (2010) dalam paparannya menggunakan sistem kodefikasi. Sistem Kodefikasi adalah pemberian tandalkode pada responden, pertanyaan, dan jawaban pertanyaan, baik dalam bentuk paragraf maupun alinea. Perumpamaan sistem pembacaan kodefikasi dijelaskan pada Gambar 3.1.



ISU AKTUAL

- Potensi dan sumber daya ikan (RP01/P4/1/2)
- Letak pelabuhan Lampulo strategis (RP02/P2/1/1)

Gambar 3.1 Pembacaan kodefikasi

Pembacaan kodefikasi Gambar 3.1, menjelaskan bahwa isu aktual dimana 1 Ha pusat gampong sudah berfungsi (RP01/P4/1/2), merupakan hasil observasi terhadap Gampong Lam Teungoh, kemudian menuliskan secara deskriptif yang tertera dalam alinea pertama, dan kalimat kedua pada lembar observasi yang telah dinarasikan. Identifikasi isu-isu yang telah ditemukan kemudian dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal dengan menggunakan teknik Brainstorming. Teknik ini dapat mengidentifikasi sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan dan sasarannya (Sarbidi, 2008). Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL		EKSTERNAL
Kelemahan (W)	Peluang (O)	Ancaman (T)
1	1	1
2	2	2
3. dan lain-lain	3. dan lain-lain	3. dan lain-lain
	Kelemahan (W) 1	Kelemahan (W) Peluang (O) 1 1 2 2

Penilaian dan Komparasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor internal dan eksternal tidak didukung dengan data yang akurat, maka akan sulit dinilai secara deskriptif, untuk itu setiap faktor hendaknya diberi penilaian dengan cara mengkuantitatifkan faktor yang bersifat deskriptif terse but. Sarbidi (2008) menuliskan bahwa penilaian dilakukan untuk mengetahui dan menentukan faktor-faktor yang lebih prioritas, penilaian ini menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, and Growth). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat urgensi dari suatu faktor, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan akibat yang ditimbulkan dengan berkembangnya masalah tersebut (LAN, 2008).

Penilaian setiap faktor internal dan eksternal akan didasarkan pada hasil pengamatan, data sekunder yang diperoleh serta wawancara yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian. Masing-masing faktor internal dan eksternal akan ditemukan dan diurutkan 3 (tiga) buah faktor yang memiliki nilai bobot tertinggi. Faktor yang diperoleh tersebut dapat diidentifikasi sebagai faktor yang memiliki kunci keberhasilan bagi perencanaan gampong. Agar faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK), maka tiap faktor-faktor akan dikornparasi/dibandingkan sesama faktor agar dapat dirangking/urutan. Perbandingan antar faktor ini menggunakan metode kornparasi yaitu membandingkan setiap faktor dengan faktor-faktor yang lain (Sarbidi, 2008).

Tiap faktor dinilai dari tingkat Urgensi (NU), Nilai Dukungan (ND) yang diberikan pemerintah, serta Nilai Keterkaitan (NK) antar faktor. Tingkat nilai yang digunakan juga menggunakan teknik scoring. Menurut Sarbini (2008) dalam Nurhafni (2012) perhitungan untuk memperoleh Total Nilai Bobot dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

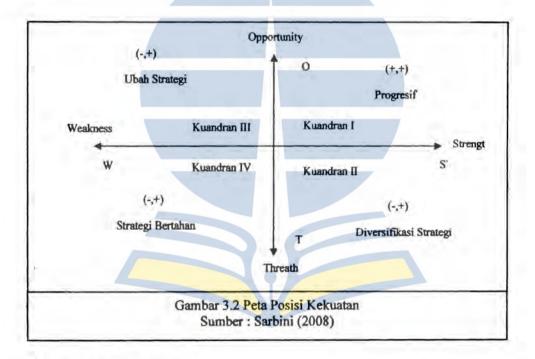
Nilai Urgensi Faktor (NU) dan Bobot Faktor (BF)
BF = NU/JUMLAH NUX 100%(3.2)
Nilai Dukungan (ND) dan Bobot Nilai Bobot Dukungan (NBD)
NBD = ND X BF(3.3)
Nilai Keterkaitan antar faktor (NK) dan Nilai Rata-Rata Keterkaitan
(NRK)
NRK = (n-l)(3.4)
Menetapkan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK)
NBK = (NRK X BF) (3.5)
Menghitung Total Nilai Bobot (TNB) dengan cara menjurnlahkan NBD
dan NBK
TNB = (NBD + NBK) (3.6)

c. Penentuan Faktor-Faktor Keberhasilan dan Peta Posisi Kekuatan

Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) merupakan faktor yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup kuat sebagai kunci keberhasilan organisasi. Kajian dalam Sarbidi (2008), FKK adalah faktor yang memiliki Total Nilai Bobot (TNB) terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian. Setiap kategori kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman masing-masing dipilih 2 (dua) atau 3 (tiga) sebagai faktor keberhasilan. Cara menentukan FKK adalah sebagai berikut:

- 1. FKK dipilih dari TNB terbesar;
- 2. Kalau TNB sama, maka dipilih BF terbesar;
- Kalau BF sama, dipilih NBD terbesar, kalau NBD sama, maka dipilih NBK terbesar;
- Kalau NBK sama, pilih berdasarkan pertimbangan rasionalitas atau pengalaman.

Berdasarkan nilai bobot keseluruhan, maka kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dipetakan dalam posisi kekuatan seperti Gambar 3.2.



1. Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

3. Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

4. Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk meenggunakan strategi bertahan,

mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

I. Metode dan Teknik Penyampaian Hasil Analisis Data

Penyajian hasil analisis data dilakukan secara informal yaitu penyajian dalam bentuk naratif, dan tampilan formal akan ditabulasikan dalam matriks/tabel. Penyajian data dalam bentuk naratif untuk mengidentifikasi potensi yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran lengkap dari permasalahan yang dibahas. Menurut LAN-RI (2008) penyajian naratif disajikan berupa:

- Rumusan tujuan, diperoleh dengan melihat hasil pemetaan pada peta kekuatan dan berada pada kuadran berapa.
- 2. Rumusan sasaran, merupakan penjabaran dari tujuan. Kriteria sasaran:
 - a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
 - b. Menantang tetapi logis dan realistis;
 - c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;
 - d. Sangat terkait visi dan misi;
 - e. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
 - f. Bersifat SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time
 - g. Related).
- Rumusan altematif strategi, dilakukan dengan pendekatan formulasi strategi SWOT. Terdapat empat altematif strategi utama yang akan diperoleh sesuai empat kuadran SWOT yakni:
 - a. Strategi ekspansi pada kuadran I

- b. Strategi diversifikasi pada kuadran II
- c. Strategi stabilitas/rasionalisasi pada kuadran III
- d. Strategi defensif/survival pada kuadran IV

Keempat altematif strategi ditabulasikan dalam Tabel3.3.

 Penyusunan Program dan Kegiatan, berdasarkan penetapan alternatif strategi yang diprioritaskan. Rumusan Alternatif Strategi, Program dan kegiatan ditabulasikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Formulasi Strategi SWOT

FKK INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	I.	1.
	2.	2.
FKK EKTERNAL	3.	3.
PELUANG (O)	STRATEGI: SO	STRATEGI: WO
1.	1.	L.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
ANCAMAN (T)	STRATEGI: ST	STRATEGI: WT
i.	i.	Í.
2.	2.	2.
3.	3.	3.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Lampulo, Panglima Laot, Pedagang ikan, nelayan, toke bangku dan masyarakat Lampulo dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristisk Responden Penelitian

N	Karakteristik	Nelayan &	Dinas, UPTD&	Pedagang	Jlh	%
0	Responden	Masyarakat	Panglima laot	redagang	310	70
1	Umur					
	- Dewasa muda (21-30 th)	18	0	2	20	20
	- Dewasa Tua (31-40 th)	27	2	3	32	32
	- Tua (>40 th)	42	1	5	48	48
		Jumlah			100	100
2	Jenis Kelamin					
	- Laki laki	82	2	8	92	92
	- Perempuan	5	1	2	8	8
	J	umlah			100	100
3	Pendidikan Terakhir					
	- SMP	12	0	0	12	12
	- SMA	45	1	8	54	54
	- Akademi	7	0	2	7	7
	- Sarjana	22	0	0	22	22
	- Pascasarjana	0	2	0	2	2
		Jumlah		,	100	100
4	Pendapatan / bln					
	- < Rp 1.7 Jt	44	0	1	45	45
	- Rp 1.7 Jt - Rp 3 Jt	28	0	6	34	34
	- >Rp 3 Jt	15	3	3	21	21
	Jumlah					100

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa distribusi frekuensi umur responden terbanyak adalah umur tua (>40 tahun) yaitu berjumlah 48%. Sementara itu, distribusi frekuensi jenis kelamin pada penelitian ini yakni laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu 82 %. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan, maka dominasi tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMA diikuti dengan tingkat sarjana yaitu 45 orang dan 22 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan tinggi masih kurang. Bila ditinjau dari pendapatan, sumber pendapatan responden yang paling banyak adalah dibawah Rp. 1,7 Juta sebanyak 45 orang. Disini terlihat bahwa tingkat pendapatan responden masih tergolong standar masuk ke dalam upah minimum Pemerintah Aceh.

B. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Lampulo

1. Sarana Pelabuhan Perikanan Lampulo

Pelabuhan perikanan pantai Lampulo memiliki tiga macam fasilitas yakni fasiltas pokok, fungsional dan penunjang. Pertama, fasilitas pokok meliputi: tanah seluas 3 Hektar, dermaga pendaratan 141 meter, dermaga tambat 83 meter, alur masuk 1000 x 80 meter, jalan kawasan pelabuhan 4.160 m² dan saluran drainase seluas 1040 meter. Kedua, fasilitas fungsional meliputi gedung Tempat Pelayanan Ikan (TPI), pabrik es, penyimpanan es, *slipway dock*, gedung bengkel, gedung pengemasan, Program Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), daya listrik sebesar 224,5 KVA, tangki air bersih dan pelataran parkir. Ketiga, fasilitas penunjang yang meliputi gedung kantor administrasi, pos jaga, pertokoan, Mandi Cuci dan Kakus (MCK) umum, bak *water treatment*, puskesmas pembantu, tempat ibadah dan gedung balai nelayan.

2. Prasarana

Ada empat jenis alat tangkap yang banyak dioperasikan oleh nelayan di Pelabuhan Perikanan Lampulo tetapi yang paling dominan adalah purse seine, 225 unit atau 69,44 %, pancing 95 unit atau 29,32 % dan gille net serta sero masingmasing 2 set atau 0,61 %. Jumlah nelayan/ABK tahun 2010 sebanyak 3840 orang (Tabel 4.2). Alat tangkap yang dioperasikan di PP Lampulo ini sesuai dengan kebijakan Dirjen Perikanan (1999) yang menyatakan bahwa alat tangkap yang potensial untuk dikembangkan adalah purse seine, gillnet, long line, pole and line, trammel net dan pancing. Rekomendasi penggunaan jenis alat tangkap tersebut disesuaikan dengan potensi sumberdaya ikan yang belum terekploitasi.

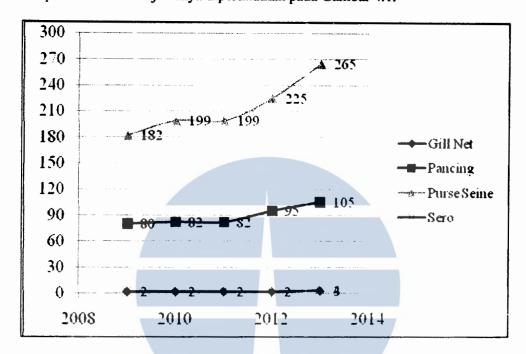
Tabel 4.2 Jumlah armada dam alat tangkap di PP Lampulo

No	Armada Tangkap Pertahun No perkategori (Gross Tone)				No	Alat Tangkap (Set)							
		2009	2010	2011	2012	2013			2009	2010	2011	2012	2013
1	< 5	52	54	54	22	22	1	Gill Net	2	2	2	2	3
2	<10	80	82	82	91	91	2	Pancing	80	82	82	95	105
3	<20	41	46	46	40	53	3	Purse Seine	182	199	199	225	265
4	21 – 30	50	53	53	79	89	4	Sero	2	2	2	2	4
5	31 – 50	36	40	40	76	76		•		-		-	-
6	51 – 100	8	10	10	16	19			-	-	-	-	
	Jumlah 267 285 285 324 350				Jumiah	285	285	285	324	377			
	Jumlah Nelayan / ABK (Orang)					3782	3840	3840	4212	4521			

Sumber: UPTD Lampulo, 2014

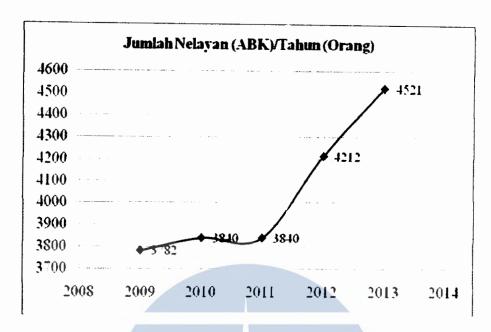
Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah alat tangkap tahun 2011 tidak ada yang bertambah menggambarkan tingkat eksploitasi dan pemanfaatan potensi sumber daya laut pada tahun tersebut belum berkembang. Data ini menunjukkan bahwa jenis purse seine dan pancing mengalami perkembangan yang paling pesat. Hal

ini disebabkan karena alat tangkap inilah yang paling banyak memberikan keuntungan dalam pengoperasiannya. Jumlah alat tangkap Pelabuhan Perikanan Lampulo berdasarkan jenisnya diperlihatkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Jumlah alat tangkap PP Lampulo

Berdasarkan Gambar 4.1 menjelaskan bahwa perkembangan armada penangkapan ikan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah armada dari tahun 2010 sampai tahun 2012 terus bertambah dengan pertambahan pertambahannya 39 armada. Pada tahun 2013 purse seine bertambah alat tangkap menjadi 265 unit. Perkembangan armada baik jumlah maupun kapasitasnya sesuai dengan kebijakan dan arahan dari Ditjen Perikanan (1999) yang menyatakan bahwa pengembangan usaha penangkapan ikan dilakukan melalui penambahan armada dalam rangka optimalisasi peningkatan produksi perikanan. Jumlah nelayan/Anak Buah Kapal (ABK) tahun 2013 meningkat dari sebelumnya 4212 orang menjadi 4521 orang yang diperlihatkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Jumlah nelayan/Anak Buah Kapal (ABK) PP Lampulo pertahun

Jumlah nelayan/ABK tersebut dihitung berdasarkan kapal yang terdata dan melakukan akitifitas bongkar muat ikan di pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh. Terjadi peningkatan nelayan dari tahun 2010 ke tahun 2012, peningkatan jumlah ABK kapal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah armada kapal ikan di Provinsi Aceh yang berdomisili di Pelabuhan Perikanan Lampulo diperlihatkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah kapal yang berdomisili di PP Lampulo

Tahun		Kapal Motor								
	<5 GT	5-10 GT	11-20 GT	21-30 GT	31-50 GT	51-100 GT	>100 GT	Jumlah		
2009	52	80	41	50	36	8	-	267		
2010	54	82	46	53	40	10		285		
2011	31	88	31	43	39	9		241		
2012	22	91	40	79	76	16		324		
2013	22	114	43	92	86	19	1	377		

Sumber: UPTD Lampulo, 2014

C. Mekanisme Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo

Pengertian perikanan sesuai dengan Undang-Undang No.31/2009 jo UU No. 45/2009 tentang perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pembangunan perikanan tangkap pada hakekatnya berarah pada pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan rasional bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan khususnya, tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya ikan itu sendiri maupun lingkungannya. Selanjutnya, UU Perikanan No 31/2004 juga mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan, termasuk kegiatan perikanan tangkap, harus dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Dari hasil data yang diperoleh bahwa produksi perikanan tangkap Aceh tahun 2012 yaitu 155.540 Ton. Produksi perikanan tangkap Nasional tahun 2012 yaitu 5,81 Juta Ton. Jumlah armada perikanan tangkap di Aceh pada tahun 2012 sebanyak 17.346 unit terdiri dari; perahu tanpa motor 3.900 unit (22,48%), motor tempel 4.813 unit (27,75%), kapal motor 8.633 unit (49,77%) (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2014). Sementara itu jumlah nelayan total di Aceh sebanyak 64.466 orang yang diperlihatkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah armada perikanan tangkap, produksi perikanan dan jumlah nelayan tahun 2012 di Provinsi Aceh

No	Jumlah A	Armada Perikanan Tangk	a p	
1	Armada Tangkap	Jumlah	Total	
	Perahu tanpa motor	3900 unit		
	Motor temple	4813 unit		
	Kapal Motor	8633 unit	173446 unit	
2	Produksi Ikan	155540 ton	155540 ton	
3	Jumlah Nelayan	64466 unit	64466 unit	
		l		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2014

Tatanan kepelabuhanan perikanan dalam rangka penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Tatanan kepelabuhanan perikanan sekurang-kurangnya memuat fungsi Pelabuhan Perikanan, fasilitas Pelabuhan Perikanan dan rencana induk Pelabuhan Perikanan. Mekanisme pengelolaan pelabuhan perikanan Lampulo berpedoman dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Aceh yang meliputi WPP 571 dan WPP 572 yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Mekanisme pengelolaan dan pembangunan pelabuhan perikanan di Provinsi Aceh yaitu: 1) Pembangunan Pelabuhan Utama (Pelabuhan Perikanan Besar setingkat PPS/PPN) sebagai Growth Center Utama dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Aceh; 2) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pendukung (Pelabuhan Perikanan Menengah setingkat PPP) sebagai Growth Center pendukung juga dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Aceh; dan 3) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Penunjang (Pelabuhan Perikanan Kecil setingkat PPI) sebagai *Growth Center* penunjang dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Saat ini pengelolaan pelabuhaan perikanan Lampulo masih berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo.

Sementara itu, pembangunan pelabuhan perikanan baru Lampulo telah dilaksanakan di daerah yang sudah berkembang kegiatan usahanya (pendekatan sentralisasi). Lampulo direncanakan sebagai pusat industi dan pemasaran hasil perikanan (pendekatan distribusi). Kebijakan pembangunan prasarana perikanan tangkap meliputi: berorientasi pada kepentingan daerah dan nasional, pemberdayaan kelembagaan dan ekonomi masyarakat (stakeholder); pemerataan pembangunan berdasarkan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) dengan pendekatan wilayah, penumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan berproduksi, distribusi produk perikanan dan pengembangan industri perikanan.

Mekanisme pengelolaan Pelabuhanan Perikanan Lampulo Banda Aceh sesuai dengan tujuan pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai dengan Pasal 3, UU No 31 Tahun 2004 jo UU No. 45/2009 yaitu: 1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan-kecil; 2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara; 3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja; 4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani; 5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; 6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; 7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri

pengolahan ikan; 8) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan 9) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Ruang lingkup pengelolaan pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh meliputi: 1) tatanan kepelabuhanan perikanan; 2) perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan; 3) pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan; 4) lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan; 5) wilayah kerja dan pengoprasian Pelabuhan Perikanan; 6) pengusahaan Pelabuhan Perikanan; 7) kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; 8) tata hubungan kerja di Pelabuhan Perikanan; 9) pengembangan Pelabuhan Perikanan; 10) pusat informasi Pelabuhan Perikanan; 11) kerja sama, dan 12) pengawasan.

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo Menurut Masyarakat

a. Manajemen Pelabuhan Perikanan Lampulo Menurut Masyarakat

Manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh menurut masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan dan masyarakat sekitar pelabuhan diperlihatkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Identifikasi manajemen Pelabuhan Perikanan menurut masyarakat

			1	2		3	
No	Variabel	Jlh	%	Лh	%	Лh	%
1	Pendapat kelembagaan pengelola pelabuhan Lampulo?	61	62.89	32	32.99	4	4.12
2	Kualitas Sumber Daya Manusa pengelola pelabuhan Lampulo?	60	61.9	35	36.082	2	2.062
3	Cara pelayanan Pelabuhan Lampulo saat ini?	70	72.2	27	27.835	0	0
4	Rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola pelabuhan Lampulo?	5	5.15	45	46.392	47	48.45

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa kelembagaan pengelola pelabuhan Perikanan Lampulo menurut masyarakat sudah baik, yaitu 61 responden (62,9%) memilih pengelolaan pelabuhan masuk kategori baik, sisanya 32 responden menganggap pengelolaan pelabuhan kurang baik (32,99%). Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pelabuhan sudah baik, yaitu 60 responden (61,9%) menyatakan SDM pengelola sudah baik karena pengelola sudah ada yang berpendidikan Magister (S2) dan Sarjana (S1), sisanya 36 responden (36,08%) menjawab kurang baik. Selanjutnya cara pelayanan Pelabuhan Lampulo yaitu 70 responden (72,2%) menjawab sudah baik, sisanya 27 responden (27,83%) menjawab kurang baik. Masyarakat tidak mengetahui monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaa pelabuhan perikanan Lampulo yaitu 48,45 responden (48,45%).

b. Prasarana Pelabuhan Perikanan Lampulo Menurut Masyarakat

Pengelolaan pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh harus didukung oleh sarana dan prasarana. Menurut masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan,

pedagang ikan dan masyarakat sekitar pelabuhan, sarana dan prasarana diperlihatkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Identifikasi Prasarana Pelabuhan Perikanan menurut masyarakat

No	Variabel		1		2	3	3
140	y ariabei	Ль	%	Лh	%	Лh	%
1	Sarana dan prasarana tersebut dengan mudah diakses oleh masyarakat umum, nelayan, muge ikan dan investor	47	48.45	45	46.392	5	5.15
2	Sarana dan prasarana tersebut mampu memenuhi kebutuhan pelayanan Pelabuhan Lampulo	48	49.48	41	42.3	8	8.247
3	Sarana umum seperti mushalla dan MCK mendapatkan air bersih dari PDAM	63	64.9	34	35.05	0	0
4	Dilakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Pelabuhan Lampulo tersebut	58	59.8	39	40.20	0	0

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan Lampulo menurut masyarakat sudah baik, yaitu 47 responden (48,45%) memilih sarana dan prasarana pelabuhan mudah diakses, sisanya 45 responden (46,39%) menganggap sarana dan prasarana susah diakses. Pada saat ditanya sarana dan prasarana tersebut mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pelabuhan perikanan Lampulo, yaitu 48 responden (49,48%) memilih sarana dan prasarana tersebut mampu memenuhi kebutuhan pelayanan, sisanya 41 responden (42,3%) menganggap sarana dan prasarana tidak cukup memberi pelayanan kepada masyatakat. Selanjutnya sarana umum seperti mushalla dan MCK dipakai sumber air bersih dari PDAM, 63 responden (64,9%) menjawab cukup penyediaan air bersih, sisanya 34 responden (35,05%) menjawab belum memadai. Masyarakat

mengetahui ada dilakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Pelabuhan Lampulo yaitu 58 responden (59,8%) sisanya 30 responden (40,02%) menjawab belum memedai pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan.

c. Retribusi Pelabuhan Perikanan Lampulo Menurut Masyarakat

Retribusi yang berasal dari pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh telah ikut menyumbangkan PAD bagi pemerintah daerah Provinsi Aceh yakni melalui pengutipan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan retribusi pemakaian kekayaan Aceh. Retribusi menurut masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan dan masyarakat sekitar pelabuhan diperlihatkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Identifikasi Reribusi Pelabuhan Perikanan menurut masyarakat

No	Vandahal		1		2		3
No	Variabel	Лh	%	Лh	%	Jlh	%
1	Membayar retribusi ke pengelola pelabuhan perikanan lampulo	87	89.7	10	10.309	0	0
2	Sistem penarikan retribusi dari nelayan di Pelabuhan Lampulo	64	66	24	24.742	9	9.278
3	Berapa retribusi sehari di Pelabuhan Lampulo	28	28.9	23	23.711	46	47.42

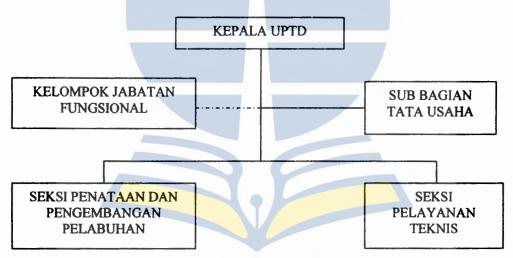
Tabel 4.7 menjelaskan bahwa masyarakat membayar retribusi ke pengelola pelabuhan perikanan Lampulo, yaitu 87 responden (89,7%) memilih membayar retribusi, sisanya 10 responden (10,30%) kadang-kadang membayar retribusi. Sistem penarikan retribusi dari nelayan, menurut masyarakat 64 responden (66%) menjawab penarikan harian, 24 responden (24,74%) menjawab mingguan, sisanya 9 responden (9,27%) menjawab bulanan. Berapa retribusi sehari di Pelabuhan, 28 responden (28,9%) menjawab kurang Rp 5 juta, sisanya 23 responden (23,71%)

menjawab lebih dari Rp 5 juta, 46 responden (47,42%) menjawab tidak mengetahui berapa nilai retribusi yang berhasil dikumpulkan sehari oleh pengelola Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh.

D. Usaha Memaksimalkan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan Lampulo

1. Tata Kelola Pelabuhan

Pelabuhan Perikanan Lampulo dikelola dengan adanya susunan organisasi dan tata kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 27 Tahun 2009. Berdasarkan peraturan gubernur tersebut struktur organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:



Gambar 4.3 Bagan organisasi dan tata kelola UPTD PP Lampulo Sumber: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2009)

Keterangan:
1. _____: Garis Komando
2. ____: Garis Pembinaan

Sementara itu, tugas pokok dan fungsi organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, meliputi:

1. Kepala UPTD yang bertugas:

- a. Memimpin UPTD dan melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas dalam lingkungan UPTD PPP Lampulo.
- c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi teknis terkait.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
- f. Melakukan pengawasan terhadap penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh dinas.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja serta anggaran untuk pembangunan dan kebutuhan operasional UPTD baik itu rutin maupun berkala.
- Melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi/publikasi, hubungan masyarakat dan perpustakaan.

- c. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Melakukan pelaksanaan penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh kepala UPTD.

3. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional merupakan semua pelaksana yang melakukan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan langsung oleh kepala UPTD.

2. Pengelola Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan merupakan multi based system diharapkan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Pelabuhan perikanan Lampulo di kelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Lampulo. Pelabuhan Perikanan sebagai: 1) Fisheries Community Development Centre, 2) Agent of Development, 3) Fisheries Industrial Estate, dan 4) Growth Centre (backwash effect and spread effect). Selanjutnya strategi pembangunan Pelabuhan perikanan yaitu: 1) Pembangunan PP di daerah yang sudah berkembang kegiatan usahanya (pendekatan sentralisasi); 2) Pembangunan di daerah yang berkembang sebagai pusat industi dan pemasaran hasil perikanan (pendekatan distribusi); 3) Pembangunan di daerah yang masih potensial (pendekatan sumberdaya perikanan); 4) Pembangunan di daerah perbatasan (pendekatan politik).

E. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat dari operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo

1. Aspek Sosial

Pelabuhan perikanan Lampulo merupakan daerah terjadinya kontak antara dua bidang sirkulasi transpor berbeda yaitu sirkulasi transpor darat dan sirkulasi transpor maritim dimana peranan pelabuhan adalah untuk menjamin kelanjutan dari skema transpor yang berhubungan dengan dua bidang tersebut. Aspek sosial masyarakat Pelabuhan Perikanan Lampulo yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan dan masyarakat sekitar pelabuhan diperlihatkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Aspek sosial masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Lampulo

			1	2		3	
No	Variabel	Jih	%	Лh	%	Jlh	%
1	Aspek sosial masyarakat nelayan di Pelabuhan Lampulo saat ini	79	81.4	18	18.557	0	0
2	Berurusan dengan pengelola pelabuhan Pelabuhan Lampulo	89	91.8	8	8.2474	0	0
3	Interaksi sosial antara pengelola, nelayan, investor dan masyarakat di PelabuhanLampulo	94	96.9	3	3.0928	0	0
4	Hubungan nelayan dengan pedagang, nelayan dengan toke bangku, nelayan dengan pengelola Pelabuhan Lampulo	97	100	0	0	0	0

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa aspek sosial masyarakat di Pelabuhan Perikanan Lampulo menurut masyarakat saat ini yaitu 79 responden (81,4%) menyatakan baik, sisanya 18 responden (18,55%) menjawab kurang baik. Pada saat ditanyakan, apakah mudah berurusan dengan pengelola Pelabuhan Perikanan Lampulo, 89 responden (91,8%) menjawab mudah, sisanya 8 responden (8,24%) menjawab rumit. Interaksi sosial antara pengelola, nelayan, investor dan

masyarakat di Pelabuhan Lampulo, 94 responden (96,6%) menjawab ada terjadi interaksi, sisanya 3 responden (3,03%) menjawab pernah ada melakukan interaksi sosial dengan pengelola.

Hubungan nelayan dengan pedagang, nelayan dengan toke bangku, nelayan dengan pengelola Pelabuhan Lampulo, 97 responden (100%) responden menjawab baik hubungan sesama di pelabuhan tersebut. Hal ini sesuai dengan Suratmo (1998), keberhasilan dan pengembangan pelabuhan perikanan serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan pelabuhan perikanan tersebut. Umumnya pada setiap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan terjadi dampak sosial baik sosial maupun ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pemanfatan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi nelayan dan masyarakat setempat. Pembangunan pelabuhan perikanan berfungsi dalam pelayanan jasa dibidang perikanan termasuk docking, pengolahan ikan, sandar kapal dan pengadaan sarana penangkapan ikan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994). Dampak kegiatan pembangunan yang positif sangat diharapkan terutama terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Namun demikian, dampak negatif yang sebenarnya tidak diharapkan dapat berakibat terhadap masyarakat sekitar itu pula (Setiadi, 1996). Dampak tersebut dapat dikemukakan melalui nilai-nilai kuantitatif pada beberapa parameter tertentu yang penting untuk menunjukkan kualitas lingkungan baik

secara fisik maupun sosial dan ekonomi seperti pendapatan masyarakat (Oamopili, 1996).

2. Aspek Ekonomi

Pelabuhan telah mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan. Oleh karenanya pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian negara. Aktivitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo telah meningkatkan perekonomian masyarakat dan nelayan Banda Aceh dan sekitarnya. Aspek ekonomi menurut masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang ikan dan masyarakat sekitar pelabuhan diperlihatkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Aspek ekonomi masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Lampulo

No	Variabel		1		2	3	
		Jih	%	Jih	%	Jib	%
1	Keberadaan Pelabuhan Lampulo berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?	97	100	0	0	0	0
2	Sistem traksaksi jual beli di Pelabuhan Lampulo antara pembeli dengan penjual?	10	10.3	13	13.402	74	76.29
3	Pendapatan nelayan sekali melaut di Pelabuhan Lampulo	22	22.7	30	30.928	45	46.39
4	Pendapatan pedagang ikan yang berjualan di Pelabuhan Lampulo satu hari	15	15.5	71	73.196	11	11.34

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa Aspek ekonomi masyarakat di Pelabuhan Perikanan Lampulo, menurut masyarakat saat ini yaitu 97 responden (100%) menyatakan ya telah berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pada saat ditanyakan sistem traksaksi jual beli di Pelabuhan Lampulo antara pembeli dengan penjual, 10 responden (10,3%) menjawab lansung di jual ke

pedagang/muge, 13 respoden (13,40%) menjawab melaui agen, sisanya 74 responden (76,29%) melalui toke bangku.

Pendapatan nelayan sekali melaut di Pelabuhan Lampulo yaitu 22 responden (22,7%) berpendapatan > Rp 3 Juta, 30 responden (30%) berpendapat Rp 2 Juta, sisanya 45 responden (46,39%) berpendapat < Rp 1 Juta. Selanjutnya pendapatan pedagang ikan yang berjualan di Pelabuhan Lampulo satu hari, yaitu 15 responden (15,5%) menjawab > Rp 3 Juta,71 responden (73,19%) berpendapat Rp 2 Juta, sisanya 11 responden (11,04%) berpendapat < Rp 1 Juta.

Pelabuhan Perikanan telah berfungsi secara optimal. Sarana pelabuhan perikanan tersebut digunakan untuk mengelola aktivitas pelabuhan yakni proses pendaratan, penangganan, pengolahan, dan pemasarannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkakan pendapatan nelayan antara lain dengan meningkatkan produksi hasil tangkapannya.

Selama ini perputaran uang di kawasan Pelabuhan Perikanan Lampulo ini bisa mencapai hampir Rp 650 Juta per hari, dengan melibatkan hampir 4.900 tenaga kerja sebutnya. Itu masih dalam kondisi di mana teknologi dan fasilitas yang ada di kawasan pelabuhan ini masih sangat terbatas. Transaksi jual beli antara pedagang dengan konsumen setiap hari rata-rata di Pelabuhan Lampulo penjualannya mencapai Rp 3,5 milyar. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan produksi ikan pada tahun 2012 mencapai 6.781 ton; produksi rata-rata adalah 568 ton/bulan. Total nilai produksi mencapai 106.504.888.000 dengan nilai jual Rp 15.000/kg, produksi ikan tertinggi pada bulan September. Peningkatan produksi

tersebut karena adanya unit penangkapan yang tinggi dalam jumlah dan hasil tangkapannya.

3. Operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo

a. Aktivitas Bongkat Muat

Aktivitas bongkat muat berhubungan langsung dengan sosial ekonomi masyarakat Lampulo yang terjadi setiap harinya mulai pukul 06.00 WIB s.d 16.00 WIB kecuali hari Jum'at tidak dilakukan bongkar muat. Aktivitas bongkar muat telah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan buruh di Pelabuhan Lampulo. Sebelum melakukan bongkar muat, kapal nelayan terlebih dahulu dipastikan melakukan tambat labuh dengan menaikkan kapal pada tambatan (boulder) yang ada di dermaga. Hasil ikan tangkapan di ambil dari palka dengan menggunakan timba yang kemudian diletakkan sambil melakukan penyortiran menurut jenis ikan, ukuran dan kesegaran.

Penyortian sangat diperlukan untuk mendapatkan produk akhir yang bermutu segar. Setelah dilakukan penyortian, ikan yang ada di keranjang di cuci bersih dan dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh juru pikul (manol) untuk dilakukan proses pelelangan, namun ada juga yang langsung menjualnya ke pembeli yang telah menunggu. Ikan tersebut dijual ke bakul dengan di timbang terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu untuk kelancaran bongkar muat, Pelabuhan Perikanan Lampulo telah menyediakan kebutuhan es balok pada pabrik es dan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga terjangkau di Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPBN).

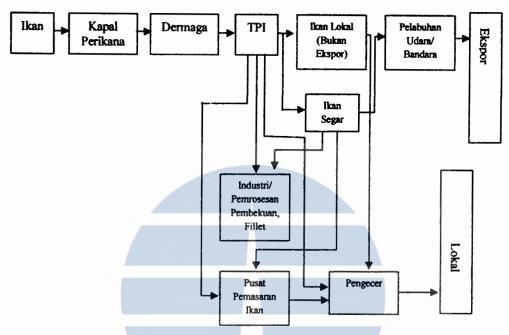
b. Aktivitas Pengepakan dan Pengangkutan

Ikan yang akan diangkut keluar pelabuhan terlebih dahulu dilakukan pengepakan di dalam cold strorage atau tong plastik yang telah di beri es, selanjutnya dinaikkan ke truk atau pick up. Sedangkan untuk ikan yang akan dibawa ke sekitar areal pelabuhan cukup dimasukkan dalam kerangjang atau kantong plastik yang kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor. Aktivitas pengepakan dan pengangkutan telah menambah porsi tenaga kerja yang berpengalaman dalam pengepakan ikan, aktivitas tersebut juga telah menambah penerimaan retribusi daerah Aceh setiap dilakukan pengangkutan ikan ke luar daerah atau luar negeri. Aktivitas tersebut secara langsung telah meningkatkan sosial ekonomi masyatakat Lampulo untuk teribat dan bekerja pada bidang pengepakan dan pengangkutan ikan yang bermutu dan segar.

c. Aktivitas Pemasaran dan Distribusi Ikan di Pelabuhan

Pelabuhan Perikanan Lampulo merupakan penampung produksi ikan segar hasil tangkapan yang selanjutnya disalurkan pada pengusaha pengolahan maupun pengusaha pemasaran lokal dan luar daerah yang telah menjalin kerjasama. Pengolahan hasil perikanan dilakukan oleh masing-masing pembeli maupun pengusaha perikanan. Secara sosial ekonomi, aktivitas pemasaran dan distribusi ikan di pelabuhan perikanan Lampulo telah meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampulo yang terlibat langsung bekerja sebagai nelayan, pedagang atau toke di pelabuhan tersebut. Di areal pelabuhan ini sendiri aktivitas pengolahan ikan baru berupa pengolahan ikan segar menjadi ikan kayu yang siap dipasarkan melalui

jalur lokal maupun jalur luar daerah. Aktivitas pemasaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Aktivitas pemasaran di PP Lampulo Sumber: UPTD Lampulo, 2014

Secara ekonomi, kehadiran pelabuhan perikanan Lampulo di desa mereka telah meningkatkan taraf hidup yait peningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat Lampulo yang bekerja di tempat tersebut. Keterlibatan masyarakat Lampulo dalam pemasaran ikan hasil tangkapan yang dilakukan di PP Lampulo sangat besar, sistem pemasaran yang terjadi di pelabuhan bukan melalui sistem lelang tetap dengan penjualan secara langsung. Tidak dilakukannya lelang menurut kepala UPTD disebabkan oleh kemampuan beli muge dan koperasi yang rendah. tidak ada petugas dan alat untuk lelang. Dengan sistem pemasaran seperti ini, maka nelayan mempunyai nilai tawar yang rendah sehingga sulit bagi nelayan untuk mendapatkan harga jual yang layak. Nilai jual rendah karena rantai

pemasaran yang lebih panjang bila dibandingkan dengan sistem lelang. Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah dengan pemasaran ikan dengan sistem lelang. Disamping itu harga-harga tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak.

Analisis Aktivitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo

1. Pembongkaran

Pembongkaran hasil tangkapan yang dilakukan oleh masing-masing ABK kapal pada umurnnya beljalan Jancar sehingga waktu yang dibutuhkan tidak lama walaupun alat yang digunakan dalam pembongkaran masih sederhana yaitu dengan menggunakan keranjang yang diangkat dengan tangan oleh dua orang. Disamping itu jarak yang dekat antara dermaga dengan TPI turut mendukung cepatnya pembongkan. Kapal-kapal yang akan berlabuh perlu melakukan antrian karena dermaga yang tersedia tidak panjang dibanding dengan kebutuhan yang ada. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membongkar sekitar 4 ton ikan adalah 3 - 4 jam atau 1 ton/jam. Pembongkaran ini ternyata juga dipengaruhi oleh posisi sandaf kapal. Kapal yang bersandar searah dengan dermaga sehingga pembongkarannya lebih cepat bila dibanding dengan posisi kapal yang tegak lurus dermaga. Hal ini antara lain disebabkan oleh ruang yang lebih luas sehingga tidak saling menghalangi antara buruh atau ABK yang mengangkut dan membongkar muatan. Pembongkaran hasil tangkapan harus dimulai subuh pagi dan diperkirakan akan selesai pada pagi hari karena transaksi penjualan paling banyak hanya sampai jam 10 pagi. Disamping itu aktivitas bongkar muat yang dilakukan pada pagi hari memerlukan waktu yang lebih lama karena sudah banyak pengunjung yang dapat mengganggu aktivitas.

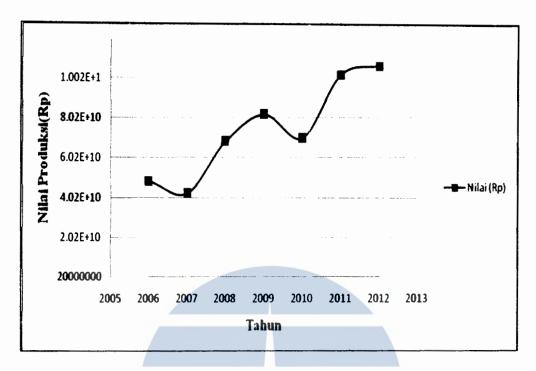
2. Penanganan Ikan

Ada dua kelompok ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Lampulo yakni: 1) Ikan untuk tujuan ekspor dan 2) Ikan untuk konsumsi lokal. Penanganan dan perlakuan terbadap kedua kelompok ini berbeda sehingga hasilnya juga berbeda dimana perlakuan terhadap ikan konsumsi lokal terkesan kurang diperhatikan dibandingkan dengan ikan untuk tujuan ekspor. Kriteria ikan segar yang dinyatakan oleh Junianto (2003) babwa ikan dikatakan segar apabila sifat-sifatnya masih saraa dengan ikan hidup baik rupa, bau, cita rasa maupun teksturnya yang ditandai dengan mata yang jemih, daging yang kenyal, sisik yang belum terlepas/lutuh insang yang merah cemerlang. Berikut jumlah produksi ikan per alat tangkap yang dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Lampulo tahun 2013 diperlihatkan pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.5.

Tabel 4.10 Jumlah produksi ikan tahun 2006 s/d 2012

N O	TAHUN	TRIP	VOLUME PRODUKSI	NILAI PRODUKSI
1	2006	2.288	5.446.289	48.531.444.700
2	2007	362	4.634.037	42.289.578.620
3	2008	3.647	4.928.027	68.366.867.000
4	2009	3.736	7.819.222	81.825.614.500
5	2010	3.247	6.083.925	69.997.066.000
6	2011	3.111	6.827.531	101.939.089.500
7	2012	3.286	6.823.158	106.504.898.050

Sumber: UPTD Lampulo, 2014



Gambar 4.5 Nilai produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Lampulo

Tabel 4.10 dan Gambar 4.5 memperlihatkan jumlah hasil tangkapan ikan per alat tangkap yang dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Lampulo yang paling banyak produksi ikan pada tahun 2009 sebanyak 7.819.222 kg dengan biaya Rp 81.825.614.500. Sedangkan nilai produksi yang paling besar adalah tahun 2012 sebanyak Rp 106.504.898.050 atau produksi ikannya sebanyak 6.823.158 kg. Secara sosial ekonomi, jumlah produksi ikan tersebut sebanding dengan jumpal kapal yang beroperasi dan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Lampulo, semakin banyak kapal yang melaut maka semakin banyak diperlukan tenaga kerja (ABK) yang bekerja dan meningkatkan produksi ikan serta menambah nilai (Rupiah) dari hasil tangkapannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai (Rupiah) hasil tangkapan ikan paling besar tahun 2012 dengan nilai Rp 106.504.898.050.

3. Analisis Kelembagaan

Pelabuhan Perikanan Lampulo digolongkan sebagai pelabuhan perikanan tipe A. Pemerintah Aceh telah meningkatkan tipe pelabuhan tersebut dari tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai) menjadi tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera). Peningkatan status ini karena telah dibangun pelabuhan baru Lampulo pada masa rehab rekonstruksi Aceh oleh BRR NAD-Nias. Pelabuhan perikanan Lampulo baru telah difungsikan oleh pemerintah Aceh pada bulan Januari 2014. Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A) merupakan pelabuhan yang diperuntukan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan dalam armada perikanan jarak jauuh sampai ke perairan Internasional mempunyai perlengkapan untuk mengolan yang sesuai dengan kapasitas handlingnya. Jumlah ikan yang didaratkan minimum 2000 ton per hari atau 73.000 ton per tahun baik untuk pemasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor.

Peningkatan status Pelabuhan Lampulo merupakan kebijakan dari Pemerintah Aceh untuk tebih mempertajam fungsi pelabuhan sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan. Aktualisasi status ini yaitu dengan mengadakan dan memfasilitasi tinjauan investor ke PP Lampulo seperti: (1) Banyak investor yang ingin menanamkan modalnya pengembangan pelabuhan Lampulo. (2) Peningkatan sarana dan prasarana di PP Lampulo. (3) Peningkatan jalan lingkungan menuju ke Lampulo (4) Pemberian bantuan 51 unit kapal perikanan kepada Kelompok Usaha Bersama Nelayan supaya dapat meningkatkan produksi ikan. (5) Pembinaan koperasi nelayan yang dilakukan secara terpadu antara oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Kelautan Aceh.

Lembaga-lembaga yang ada di PP Lampulo masih kurang bila dibandingkan dengan lembaga yang ada di pelabuhan perikanan dengan tipe yang lebih besar. Fungsi dan tugas dari lembaga terkait yang ada di PP Lampulo pada Dasarnya sama dengan fungsi lembaga menurut Lubis (2002) bahwa fungsi koperasi di Pelabuhan Perikanan selain sebagai pengelola TPI dan bahan perbekalan melaut serta kebutuhan sembilan bahan pokok juga menjual jasa penyewaan box penyimpanan ikan dan pemungutan jasa peralatan lelang (keranjang). Koperasi juga mengusahakan aktivitas simpan pinjam dengan anggotanya. Hal ini untuk memudahkan anggotanya dalam memperoleh dana segar berhubung sulitnya nelayan memperoleh kredit dari bank. Langkah-langkah yang dijalankan oleh koperasi ini sesuai dengan Elfandi (2000) yang diacu dalam Lubis (2002) menyatakan bahwa kelembagaan yang akan dikembangkan adalah kelembagaan yang dapat memenuhi kebutuhan para pelaku di pelabuhan khususnya nelayan dan masyarakat sekitarnya. Peningkatan peran koperasi di pelabuhan perikanan adalah sebagai wadah pengembangan ekonomi nelayan kecil. Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh koperasi keanggotanya dimaksudkan untuk manarik minat nelayan menjadi anggota koperasi karena dengan berserikat akan memberikan banyak manfaat.

Kebijakan yang tepat untuk mendukung pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo yang baik adalah pengembangan atau pembangunan fasilitas yang belum ada. Kebijakan modernisasi fasilitas pelabuhan dan alat tangkap nelayan. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang telah melakukan berfungsinya pelabuhan perikanan Lampulo baru dan pembangunan kapal ikan 40

GT dan 30 GT. Kapal ikan tersebut disumbangkan kepada kelompok usaha bersama nelayan yang telah aktif melaut dan memiliki anggota terdiri dari nelayan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lubis (2002) yang menyatakan bahwa pembangunan prasarana pelabuhan harus dapat mendukung pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan produksi dalam meningkatkan hasil tangkap nelayan.

Pelabuhan perikanan menampung segala kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan dan aspek pemasarannya. Pelabuhan perikanan memiliki fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pada umumnya seperti dermaga, breakwater, alur pelayaran, dan gedung-gedung perkantoran, peralatan navigasi bengkel dan sebagainya. Fasilitas lain yang mutlak dibutuhkan bagi kelancaran aktivitas usaha perikanan seperti tempat pendaratan dan pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, fishing gear work shop, yang diharapkan mampu meningkatkan usaha perikanan tangkap menghidupkan sektor perekonommian bagi penduduk disekitar (Lubis 2012).

G. Analisis SWOT Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo

Analisa SWOT digunakan untuk menentukan strategi optimalisasi kekuatan dan peluang serta untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman. Untuk melakukan analisis SWOT perlu diketahui isu-isu aktual dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampuloyang diperlihatkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Isu aktual pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Aspek	Isu actual				
	Peningkatan PAD				
	Distribusi				
Sumber Bondonston Anti Donal (BAD)	Tingkat konsumsi				
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dukungan pemerintah				
	Peningkatan pendapatan nelayan				
	Usaha penunjang				
	Fishing ground				
	Pengembangan yang tidak terbatas				
	Kualitas sumber daya manusia				
	Fasilitas PP Lampulo belum lengkap				
	Keamanan PP Lampulo				
	Sanitasi				
Tata kelola Pelabuhan Perikanan Lampulo	Mutu ikan dan Sumber Daya Ikan				
	Teknologi penangkapan				
	Sarana Prasarana utama dan penunjang yang				
	siap pakai				
	Pemeliharan terhadap sarana dan prasarana				
	BBM				
	Harga Ikan				
	Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat				
Sosial ekonomi masyarakat	Interaksi sosial				
	Sistem jual beli				
	Peningkatan pendapatan nelayan				
	Usaha penunjang				

1. Analisis Faktor Internal dan Eksternal Manajemen Pelabuhan Perikanan Lampulo

Isu aktual yang muncul tentunya mempunyai pengaruh pada manajemen Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo. Menurut Bryson dan Roering (1987) dalam Asmoko (nd), penerapan manajemen strategis dapat dilakukan dengan menekankan pada pengembangan kesesuaian antara organisasi dengan lingkungannya melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Asmoko (2001) menyebutkan dengan menggunakan model SWOT menguji sifat

permintaan dan tekanan pihak ekstemal, mengidentifikasi peluang dan kendala sumber daya, menetapkan peluang program, menetapkan tujuan dan prioritas organisasi diperlihatkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Penilaian Faktor Internal

No	Faktor internal yang diperoleh	U	s	G	Total
Α	Kekuatan (S)				
	Potensi dan Sumber Daya Ikan	5	5	4	14
	Keamanan dari gelombong	5	4	3	12
	Dukungan pemerintah	4	5	4	13
	Jarak pasar lokal dan internasional	4	3	5	12
	Letak pelabuhan strategis	5	4	3	12
	Sumber Daya Manusia	5	4	3	12
В	Kelemahan (W)				
	Kualitas sumber daya manusia	4	4	3	11
	Fasilitas PP Lampulo belum lengkap	4	3	3	10
	Keamanan PP Lampulo	5	3	3	11
	Sanitasi	4	3	3	10
	Mutu ikan	5	4	4	13
	Teknologi penangkapan	3	3	4	10
	Sarana prasarana tidak lengkap	4	4	3	11
	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana	5	4	4	13

Keterangan: sangat tinggi = 5; tinggi = 4; cukup = 3; kurang = 2; rendah = 1

2. Analisis Faktor Eksternal Manajemen Pelabuhan Perikanan Lampulo

Pengelompokkan isu aktual kedalam masing-masing faktor pengaruhnya, dilakukan dengan menggunakan teknik *Brainstorming*. Teknik ini dapat mengidentifikasi sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan dan sasarannya (Sarbidi, 2008). Untuk mengetahui faktor mana yang paling penting diantara faktor lainnya dilakukan dengan metode USG dan penilaian menggunakan teknik *scoring*. Hasil Penilaian tiap faktornya ditampilkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Penilaian Faktor Eksternal

No	Faktor eksternal yang diperoleh	U	S	G	Total
A	Peluang (O)				
	Peningkatan PAD	5	4	5	14
	Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	5	4	4	13
	Distribusi	4	4	3	11
	Tingkat konsumsi	5	4	3	12
	Peningkatan pendapatan nelayan	4	3	5	12
	Usaha penunjang	4	3	3	10
	Fishing ground	4	4	4	12
	Interaksi sosial	5	4	4	13
В	Ancaman (T)				
	BBM	5	4	4	13
	Cuaca	4	3	4	11
	Musiman ikan	4	3	4	11
	Harga ikan	4	3	4	11
	Ilegal fishing	5	4	5	14
	Perkembangan teknologi	3	3	3	9
	Sistem jual beli	4	4	4	12

Keterangan: sangat tinggi = 5; tinggi = 4; cukup = 3; kurang = 2; rendah = 1

Berdasarkan Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 terdapat 3 (tiga) faktor yang memiliki jumlah nilai tertinggi diidentifikasikan sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK). Melalui referensi didapat, tidak ada pemilihan faktor yang kurang dari 3 faktor dan lebih dari 5 faktor, hal ini untuk memudahkan dalam penilaian dan perbandingan antar faktor nantinya. Identifikasi FKK tersebut disimpulkan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Identifikasi FKK

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)							
Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana							
Dukungan pemerintah	Teknologi penangkapan							
Letak Pelabuhan Perikanan Strategis	Sarana prasarana tidak lengkap							
Peluang (O)	Ancaman (T)							
Peningkatan PAD	Ilegal fishing							
Dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo	ВВМ							
Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	Sistem jual beli							
Strategi (SO)	Strategi (WO)							
Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD di lingkungan pelabuhan	Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo							
Meningkatkan produksi	Meningkatkan penggunaan teknologi terkini							
Strategi (ST)	Strategi (WT)							
Menstabilkan dan peningkatan pasokan solar	Bekerja sama dengan pihak ketiga berkaitan							
Penertiban penjualan ikan di PP Lampulo								
	pengembangan PP Lampulo							
Import ikan	Penutupan PP Lampulo							

Penelitian Kesuma (2011), menyebutkan bahwa identifikasi faktor kunci yang diperoleh dari penilaian tingkat urgensi, telah dapat digunakan dalam matriks formulasi alternative SWOT untuk memperoleh strategi (SO), (ST), (WO), (WT). Masing-masing strategi dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ada. Kelemahan maupun ancaman tidak hanya bertindak sebagai faktor penghambat, namun juga sebagai faktor pendukung. Dengan adanya kelemahan dan ancaman tersebut, maka pemanfaatan kekuatan dan peluang dapat dioptimalkan.

Kajian oleh Sarbidi (2008) lebih meringkaskan dengan melakukan metode komparasi terlebih dahulu dengan membandingkan antar faktor yang telah diidentifikasi sebagai FKK. Komparasi ini adalah untuk menilai tingkat urgensi,

dukungan dan keterikatan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Hasil komparasi ini antar faktor internal yang kemudian ditetapkan sebagai FKK diperlihatkan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Komparasi Urgensi Faktor Internal

No	FAKTOR INTERNAL	A	b	c	d	e	f	NU	BF(%) NU
	Kekuatan (S)								Total NU
A	Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi		a	a	a	е	f	4	30,77
В	Dukungan pemerintah	a	4.04	ь	ь	e	ь	3	23,08
С	Letak Pelabuhan Perikanan Strategis	a	С		С	е	f	1	7,69
	Kelemahan (W)								
D	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana	d	d	đ		e	e	2	15,38
E	Teknologi penangkapan	a	С	е	d	Ar is	f	2	15,38
F	Sarana prasarana tidak lengkap	a	С	d	е	f		1	7,69
TOTAL NILAI URGENSI								13	100,00

Berdasarkan Tabel 4.15 menjelaskan bahwa kekuatan sumber daya ikan Aceh masih berpotensi sehingga diperlukan pelestarian dan menjaga lingkungan serta mengelola sumber daya ikan di Laut Aceh dan sekitarnya dengan cara memperketat penggunaan alat tangkap sepertu pukat harimau. Faktor kekuatan lebih besar dibanding nilai tertimbang kelemahan pengelolaan pelabuhan perikanan dan disaat yang sama nilai tertimbang peluang perusahaan lebih besar dari nilai tertimbang ancaman maka memposisikan Pelabuhan seyogyanya menerapkan strategi pertumbuhan agresif. Faktor yang memberi pengaruh terhadap pengelola pelabuhan perikanan Lampulo selanjutnya yaitu dukungan pemerintah, dari hasil analisa masih tinggi dukungan pemerintah terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Lampulo dan faktor peluang yang menyebabkan maju mundurnya pelabuhan adalah letak pelabuhan, saat ini

Hasil komparasi antar faktor eksternal yang kemudian ditetapkan sebagai FKK diperlihatkan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Komparasi Urgensi Faktor Eksternal

No	FAKTOR EKTERNAL	2	b	С	d	e	f	NU	BF(%) NU
	Peluang (O)								Total NU
Α	Peningkatan PAD	i dys	a	a	а	е	f	3	18,75
В	Dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo Munculnya lapangan kerja bagi	a		b	b	е	b	2	12,50
С	masyarakat	a	С		c	е	f	2	12,50
	Ancaman (T)								
D	Ilegal fishing	d	d	d	in Table	e	e	4	25,00
Е	ВВМ	a	С	е	d	L. Lucia	f	3	18,75
F	Sistem jual beli	a	С	d	e	f		2	12,50
	TOTAL NILAI URGENSI							16	100,00

Dari penilaian (NU) diperoleh Bobot Faktor (BF) tiap faktor baik internal maupun eksternal. Menurut LAN (2008) bobot suatu faktor dalam organisasi ukuran relatif pentingnya keberadaan suatu faktor dalam mencapai tujuan dan sasaran. Nilai Dukungan (ND) untuk melihat seberapa besar dukungan yang diberikan pemerintah terhadap faktor. Nilai dukungan factor internal ditabulasikan dalam Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Nilai Dukungan Faktor Internal

No	FAKTOR INTERNAL	Bobot Faktor (%)	Nilai Dukungan (ND)	NDB (BFxND)
	Kekuatan (S)			
Α	Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi	30.77	5	1.54
В	Dukungan pemerintah	23.08	4	0.92
С	Letak Pelabuhan Perikanan Strategis	7.69	5	0.38
	Kelemahan (W)			
D	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana	15.38	3	0.46
Е	Teknologi penangkapan	15.38	2	0.31
F	Sarana prasarana tidak lengkap	7.69	3	0.23
	TOTAL NILAI URGENSI			

Keterangan: sangat tinggi = 5; tinggi = 4; cukup = 3; kurang = 2; rendah = 1

Dalam Tabel 4.17 menggambarkan bahwa sumber daya ikan Aceh masih berpotensi yang bisa dimanfaakan oleh nelayan, sedang faktor pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana menjadi permasalahan disebabkan karena kurangnya pemeliharaan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan perikanan Lampulo terhadap sarana tersebut. Selanjutnya dukungan pemerintah menjadi kekuatan dalam pengembangan pelabuhan perikanan menjadi maju dan berkembang di Aceh, sedangkan faktor teknologi penangkapan ikan menjadi masalah yang dihadapi oleh nelayan Aceh dalam menangkap ikan. Letak pelabuhan perikanan lampulo strategis, hal kekuatan yang mendukung pengembangan pelabuhan perikanan tersebut, sedangkan sarana dan prasarana tidak lengkap menjadi kelemahan dalam pengembangan pelabuhan tersebut. Nilai Bobot Dukungan (NBD) diperoleh dengan menggunakan BF masing-masing faktor. Nilai dukungan faktor ekstermal ditabulasikan dalam Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Nilai Dukungan Faktor Eksternal

No	FAKTOR INTERNAL	Bobot Faktor (%)	Nilai Dukungan (ND)	NDB (BFxND)
	Kekuatan (S)			
Α	Peningkatan PAD	27.77	5	1.36
В	Dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan Pelabuhan Lampulo	18.18	5	0.91
С	Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	18,18	5	0.91
	Kelemahan (W)			
D	Ilegal fishing	25,00	2	0,50
Е	ВВМ	18,75	2	0,38
F	Sistem jual beli	12,50	2	0,25
	TOTAL NILAI URGENSI			

Keterangan: sangat tinggi = 5; tinggi = 4; cukup = 3; kurang = 2; rendah = 1

Selanjutnya komparasi keterkaitan faktor dengan melihat keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya dengan memberi skala nilai pada tingkat keterkaitan, setelah didapat NK akan diperoleh Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK). Perhitungan Nilai Keterkaitan ditabulasikan Tabel 4.14. Total Nilai Bobot (TNB) dari NBD dan NRK yang diperoleh FKK dapat dirangkingkan sesuai Total Nilai Bobot (TNB) tertinggi dan seterusnya. Perhitungan ditabulasikan Tabel 4.18 disimpulkan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Perhitungan NK, NRK dan TNB

N	FAKTOR				Nil	ai K	eter	kait	an (NK))			BF	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
0	INTERNAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	l l	12	(%)					
	Kekuatan (S)																		-
1	Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi		3	3	2	5	4	4	3	3	2	3	4	30,8	1,54	3,27	1,01	2,55	SI
2	Dukungan pemerintah	3		3	2	3	4	4	2	4	2	2	3	23,1	0,91	2,91	0,67	1,59	S2
3	Letak PP Strategis	3	3		3	2	4	5	3	2	3	4	2	7,7	0,38	3,09	0,24	0,62	S3
	Kelemahan (W)			1453.563														4,76	
4	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana	5	4	3		3	3	4	5	3	4	4	2	15,4	0,46	3,64	0,56	1,02	WI
5	Teknologi penangkapan	4	5	2	3		4	4	3	4	4	5	3	15,4	0,31	3,82	0,59	0,9	₩2
6	Sarana prasarana tidak lengkap	3	3	4	3	2		3	4	4	2	2	2	7,7	0,23	2,91	0,22	0,45	W3
TOTAL								100	7			2,37							
N	FARTOR		Nilai Keterkaitan (NK)											BF	NBD	NRK	NBK	TNB	FKK
0	FAKTOR EKSTERNAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	12	(%)					
	Peluang (O)																		
7	Peningkatan PAD	3	2	2	3	3	3	4	3	4	2	3	3	18,8	0,94	2,82	0,53	1,47	01
8	Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan PP Lampulo	4	2	2	2	5	3	3		3	4	3	3	12,5	0,63	3,09	0,39	1,01	02
9	Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	3	3	4	2	3	3	2	2		2	2	3	12,5	0,63	2,64	0,33	0,95	03
	Ancaman (T)																	3,43	
10	Ilegal fishing	2	3	3	3	2	3	3	3	2		3	4	25,0	0,5	2,82	0,7	1,2	TI
11	ввм	3	3	2		2	3	3	<u> </u>	3	3			18,8	0,38	2,73	0,51	0,89	T2
12	Sistem jual beli	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	精製	12,5	0,25	2,45	0,31	0,56	T3
	TOTAL													100				2,65	

Berdasarkan Tabel 4.18 menjelaskan bahwa perhitungan NK, NRK dan TNB diperlihatkan dalam Tabel 4.20 dan Tabel 4.21.

Tabel 4.20 FKK Faktor Internal

FAKTOR INTERNAL				
	Kekuatan (S)		Kelemahan (W)	
SI	Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi	W1	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana	
S2	Dukungan pemerintah	W2	Teknologi penangkapan	
S 3	Letak Pelabuhan Perikanan Strategis	W3	Sarana prasarana tidak lengkap	

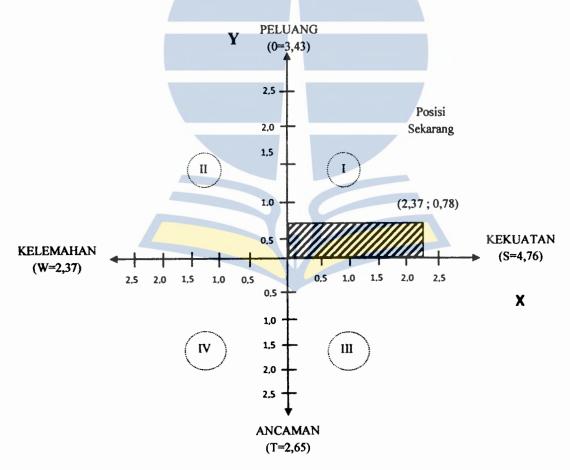
Tabel 4.21 FKK Faktor Eksternal

	AKTOR E	KSTE	RNAL
	Peluang (O)		Ancaman (T)
01	Peningkatan PAD	T1	Ilegal fishing
02	Dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo	T2	ввм
О3	Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	Т3	Sistem jual beli

Tabel 4.20 dan Tabel 4.21 menjelaskan bahwa FKK yang telah diperoleh tersebut baik faktor internal dan eksternal digunakan sebagai acuan atau dasar pengambilan pada penentuan peta posisi kekuatan organisasi, penentuan tujuan, sasaran, dan strategi. Berdasarkan referensi beberapa jurnal, pemilihan FKK (1, 2 dan 3 faktor) tergantung pada kondisi pengelola pelabuhan perikana Lampulo dalam manajemennya. Apabila strategi yang ingin dicapai dalam prioritas yang cukup tinggi, maka pemilihan FKK cukup satu faktor saja yang memiliki nilai tertinggi.

3. Peta Posisi Kekuatan

Peta posisi kekuatan dapat dilihat dari Total Nilai Bobot (TNB) yang diperoleh pada Tabel 4.15, diperoleh skor kekuatan (S) yaitu 4,76 sedangkan skor kelemahan (W) adalah 2,37 sehingga bila (S - W) merupakan sumbu X, maka nilai yang didapat adalah 2,39. Untuk skor peluang (0) adalah 3,43 sedangkan skor ancaman (T) adalah 2,65 sehingga bila (0 - T) yang merupakan sumbu Y nilai yang didapat adalah 0,78. Nilai yang diperoleh menjelaskan bahwa posisi manajemen pelabuhan perikanan Lampulo berada dalam kondisi kuat (2,37), dan memiliki peluang (0,78) cukup baik dijelaskan pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Peta Posisi Kekuatan

Berdasarkan Gambar 4.6 menjelaskan bahwa pengelola pelabuhan perikanan Lampulo berada pada posisi kuadran I. Posisi ini menandakan manajemen pelabuhan perikanan yang kuat dan berpeluang berkembang membangun perikanan di Aceh. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya pengelola pelabuhan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk implementasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan perencanaan, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal untuk kemajuan pelabuhan perikanan Lampulo dimasa mendatang. FKK kekuatan internal yang diperoleh sumber daya ikan Aceh masih berpotensi baik dan bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk menambah pendapatan dan produksi ikan, selanjutnya faktor dukungan pemerintah menjadi kekuatan dalam pengembangan pelabuhan perikanan lampulo, dan letak pelabuhan perikanan strategis, serta FKK dari faktor eksternal dengan dukungan kuat dari masyarakat untuk membangun gampongnya.

H. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Pelabuhan

Berdasarkan pada tahapan perencanaan, penetapan tujuan merupakan langkah awal. Maka, merujuk basil peta kekuatan perencanaan, dimana pada saat pengelola pelabuhan perikanan lampulo berada pada kuadran I yang memiliki kekuatan dan peluang. Sehingga rumusan tujuan dan sasaran dapat dihasilkan dengan menggunakan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) kekuatan dan peluang. Rumusan tujuan dan sasaran diillustrasikan pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22 Formulasi Alternatif Strategi SWOT

FKK INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana
	Dukungan pemerintah	Teknologi penangkapan
FKK EKTERNAL	Letak Pelabuhan Perikanan Strategis	Sarana prasarana tidak lengkap
PELUANG (O)	STRATEGI: SO Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI: WO Stategi menggunakan kelemahan dengan memanfaakan peluang
Peningkatan PAD	Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD di lingkungan pelabuhan	Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
Dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo	Meningkatkan produksi	Meningkatkan penggunaan teknologi terkini
Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD di lingkungan pelabuhan	Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
ANCAMAN (T)	STRATEGI : ST Strategi memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI: WT Stategi memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman
Ilegal fishing	Menstabilkan dan peningkatan pasokan solar	Bekerja sama dengan pihak ketiga berkaitan
ВВМ	Penertiban penjualan ikan di PP Lampulo	Pengembangan PP Lampulo
Sistem jual beli	Impor ikan	Penutupan PP Lampulo

Dari Tabel 4.22, diperoleh 12 (duabelas) strategi dalam empat alternatife strategi (SO, WO, ST, dan WT) pada matriks SWOT. Menurut LAN (2008) untuk memperoleh dan memilih altematif strategi sebagai strategi prioritas, cukup memfokuskan pada strategi kuadran terpilih. LAN (2008) menyebutkan pula bahwa apabila terjadi keterbatasan biaya dan ketidakmampuan sumberdaya manusia dalam manajemen tersebut untuk memfokuskan pada satu kuadran, maka cukup mengambil satu strategi dari empat (4) kuadran alternatif strategi (SO, WO, ST, dan WT). Apabila tidak memungkinkan juga cukup memilih salah satu strategi dalam alternatif strategi yang ada. Jika mengikuti referensi LAN (2008) maka, manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan Lampulo memiliki kondisi manajemen pada kuadran SO, artinya cukup melaksanakan strategi ekspansi sebagai strategi prioritas ke dalam bentuk program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Faktor lain yang mempengaruhi perencanaan adalah seberapa sering rencana-rencana harus ditinjau kembali dan diperbaiki. Ini terganiung pada sumber daya yang tersedia dan derajat ketetapan perencanaan manajemen. Maka dengan mengadopsi kedua referensi diatas, diambil kesimpulan bahwa perencanaan Gampong Lam Teungoh melaksanakan keduabelas (12) strategi dalam empat (4) alternatif strategi (SO, WO, ST, dan WT) sebagai rencana strategi dan acuan dalam implementasi program pembangunan gampong, namun keseluruhan strategi tersebut tetap akan dikelompokkan kedalam tahapan waktu pelaksanaan yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pengelompokkan ini hanya didasarkan pada pengetahuan dan kesimpulan selama melakukan penelitian.

Pengelompokkan strategi dalam tahapan waktu adalah sebagai berikut :

 Rencana Jangka Pendek, merupakan strategi pada kuadran terpilih yaitu alternatif strategi SO, strategi tersebut antara lain:

- a. Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD
 di lingkungan pelabuhan perikanan Lampulo
- b. Meningkatkan produksi ikan
- c. Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD
 di lingkungan pelabuhan perikana Lampulo

Dengan pertimbangan, bahwa ketiga strategi tersebut dapat dilaksanakan pada saat ini juga, dikarenakan pemanfaatan lahan menjadi produktif serta melakukan pemeliharaan dan perawatan lahan tetap terjaga, menambah MCK dan sanitasi di Gampong Lam Teungoh, yaitu pemanfaatan lahan produktif telah digunakan oleh masyarakat, dan dengan seiring waktu dapat menyusun untuk mulai merencanakan program penambahan MCK dan sanitasi gampong.

- 2. Rencana Jangka Menengah, merupakan altematif WO dan ST, strategi tersebut antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
 - b. Meningkatkan penggunaan teknologi terkini
 - c. Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
 - d. Menstabilkan dan peningkatan pasokan solar
 - e. Penertiban penjualan ikan di PP Lampulo
 - f. Impor ikan

Dengan pertimbangan, bahwa ke enam strategi jangka menengah tersebut dapat dilaksanakan pada saat ini juga, dikarenakan belum ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di Pelabuhan Perikanan Lampulo sehingga seiring waktu

dapat menyusun untuk mulai merencanakan pembangunan dan implementasinya untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

- 3. Rencana Jangka Panjang, adalah altematif WT, strategi tersebut antara lain:
 - a. Bekerja sama dengan pihak ketiga berkaitan.
 - b. Perkembangan PP Lampulo
 - c. Penutupan PP Lampulo

Strategi pada jangka panjang merupakan strategi hasil artinya apabila strategi pada jangka panjang pendek dan jangka panjang tidak berjalan, maka strategi pada jangka panjang ini akan mustahil untuk dilaksanakan, misalkan penutupan PP Lampulo.

Berdasarkan Tabel 4.18 menjelaskan bahwa peluang untuk meningkatkan PAD masih berpeluang. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan peningkatan sarana serta prasarana di Pelabuhan Perikanan Lampulo, sehingga akan meningkatkan mobilisasi nelayan yang melakukan aktivitas bongkar muat di ikan di pelabuhan tersebut. Faktor peluang lainnya adalah dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo dengan meningkatkan penyediaan alokasi dana di APBN dan APBD. Alokasi dana tersebut akan menambah pembangunan sarana dan prasarana di pelabuhan, seperti perluasan dermaga pendaratan, dermaga tambat, alur masuk, jalan kawasan pelabuhan, saluran drainase. Selanjutnya peningkatan Tempat Pelayanan Ikan (TPI), pabrik es, penyimpanan es, slipway dock, gedung bengkel, gedung pengemasan, Program Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), tangki air bersih dan pelataran

parkir. Selanjutnya peningkatan dan perawatan fasilitas penunjang yang meliputi gedung kantor administrasi, pos jaga, pertokoan, Mandi Cuci dan Kakus (MCK) umum, bak water treatment, puskesmas pembantu, tempat ibadah dan gedung balai nelayan.

Pelabuhan perikanan Lampulo telah lapangan kerja bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, toke bangku dan pekerja harian di pelabuhan. Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam penunjang.

Selanjutnya faktor ancaman dengan adanya pelabuhan yaitu *Ilegal* fishing yang terjadi di sekitar laut Aceh dan sekitarnya. *Illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi ancaman disebabkan karena stok BBM di SPBN nelayan Lampulo habis. Pada waktu BBM habis nelayan membeli minyak di SPBU, hal ini menjadikan ancaman terhadap aktivitas nelayan melaut. Pada saat tidak ada minyak, nelayan tidak bisa pergi melaut sehingga mempengaruhi PAD sektor perikanan. Faktor selanjutnya menjadi ancaman adalah sistem jual beli berupa kegiatan pelalangan ikan hasil tangkapan nelayan merupakan kegiatan utama dan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dalam pelelangan ini tercakup kegiatan administrasi mulai pencacatan, penarikan retribusi dan lalin-lain yang dilakukan oleh petugas TPI, kegiatan jual beli yang melibatkan pemilik ikan/penjual dan pedagang atau pembeli yang dipraktekkan di Pelabuhan Perikanan Lampulo adalah jual beli dari toke bangku kepada pedagang dan muge ikan.

I. Pembahasan Tentang Usaha Mekanisme Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelabuhan Perikanan Lampulo

Kawasan Pelabuhan Lampulo diharapkan potensi perikanan Aceh bisa lebih meningkat dan optimal, sehingga geliat ekonomi masyarakat nelayan semakin berkembang, sekaligus dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah disebutkan bahwa setiap daerah memiliki wewengan untuk menggali sumber-sumber penerimaan bagi daerah dan dapat digunakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh terdiri atas: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/Kota; 4) Zakat; dan 5) lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

Pelabuhanan Perikanan Lampulo sebagai salah satu sumber PAD di Provinsi Aceh. Pelabuhan tersebut dikelolah oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh ikut menyumbangkan PAD bagi pemerintah daerah Provinsi Aceh yakni melalui

pengutipan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan retribusi pemakaian kekayaan Aceh. Penerima PAD dari UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo mulai tahun 2009 s/d 2013 diperlihatkan pada Tabel 4.23.

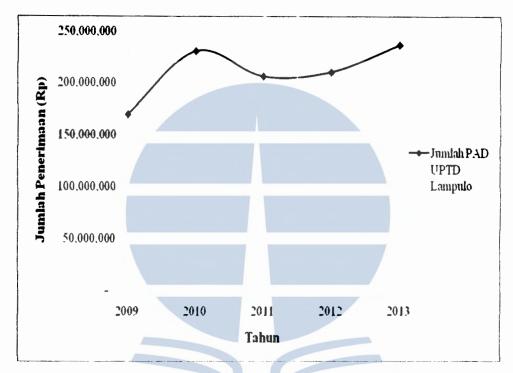
Tabel 4.23. PAD dari UPTD Lampulo

No	Tahun	Kegiatan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1	2009	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	169.228.000
2	2010	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	230.910.000
3	2011	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	166.387.500
4	2012	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	159.194.000
5	2013	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	212.356.040
		Jumlah	938.075.540

Sumber: UPTD Lampulo, 2014

Berdasarkan nilai tersebut restibusi yang berasal dari pas masuk, tambat labuh, sewa gudang pengepakan dan pabrik es telah terjadi peningkatan PAD secara fluktuatif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD Lampulo didapatkan bahwa nilai retribusi pas masuk pelabuhan yang terkumpul sebulan sebesar Rp 2.000.000, selanjutnya terima jasa dari operasional pabrik es sebelun sebesar Rp 1.500.000. Dana tersebut dikumpulkan oleh UPTD kemudian dibagi dengan pelabuhan, setelah potong uang operasional maka uang tersebut disetor ke kas daerah. Keberadaan pelabuhan Lampulo mendukung meningkatkan pendapatan nelayan serta meningkatkan ekspor non migas Aceh. Kawasan

perikanan di Lampulo termasuk salah satu lokasi bisnis perikanan yang sangat strategis, baik itu ditinjau dari aspek potensi sumber daya perikanan, potensi sumber daya manusia, dan juga potensi kegiatan usaha perikanan. Penerima PAD dari UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo mulai tahun 2009 s/d 2013 diperlihatkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Penerimaan PAD dari UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo

Gambar 4.3 menjelaskan bahwa jumlah PAD tersebut terkumpul dari pelayanan jasa pelabuhan di setor ke kas daerah Aceh/Gubernur Aceh Nomor Rekening 01.02.120003-4 setiap bulannya, uang tersebut menjadi PAD Aceh pada sektor perikanan. Jumlah PAD yang terkumpul pada tahun 2009 sebesar Rp 169.288.000, pada tahun 2010 nilai PAD meningkat menjadi Rp 230.910.000; selanjutnya tahun 2011 dan 2012 nilai PAD menurun menjadi Rp 205.810.000 dan Rp 210.194.000. Pada tahun 2013, PAD yang terkumpul meningkat menjadi

Rp 236.856.040, penerimaan retribusi dari kegiatan pelabuhan perikanan Lampulo bervariasi dan pendapatannya yang fluktuatif yaitu naik turunnya uang jasa penerinamaan yang menjadi kas daerah.

Penurunan penerimaan PAD pada tahun 2011 dan 2012 terjadi karena adanya penurunan aktivitas bongkar muat di pelabuhan perikanan Lampulo disebabkan karena tingkat hasil tangkap ikan nelayan menurun. Hasil tangkap nelayan menurut disebabkan karena belum modernisasi alat tangkap dan masih tingginya illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Aceh. Faktor kedua adalah kapal ikan (nelayan) tidak melaut pada waktu tertentu disebabkan oleh cuaca dan perubahan iklim. Peningkatan PAD pada tahun 2013 disebabkan karena bertambahnya armada perikanan yang melakukan bongkat muat di pelabuhan Lampulo. Akibatnya meningkatnya produksi ikan dan aktivitas di pelabuhan telah meningkatkan jasa sewa lahan UPTD Lampulo, jasa retribusi ikan, jasa retribusi pelayaran, jasa sewa gedung dan jasa pelayanan sehingga telah berdampak meningkatnya penerimaan PAD pada sektor perikanan. Jenis penerimaan PAD tahun 2013 bersumber dari sewa lahan UPTD Lampulo sebesar Rp 67.363.520,- retribusi pelayanan sebesar Rp 47.000.000, retribusi ikan Lampulo sebesar Rp 41.968.520.

J. Strategi Peningkatan PAD Pelabuhan Perikanan Lampulo

Strategi peningkatan PAD yang bersumber dari Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkaran sarana serta prasarana Pelabuhan Perikanan Lampulo, yaitu:

Berdasarkan Tabel 4.18 menjelaskan bahwa perhitungan NK, NRK dan TNB diperlihatkan dalam Tabel 4.20 dan Tabel 4.21.

Tabel 4.20 FKK Faktor Internal

	FAKTOR	INTE	RNAL
	Kekuatan (S)		Kelemahan (W)
S1	Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi	Wı	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana
S2	Dukungan pemerintah	W 2	Teknologi penangkapan
S 3	Letak Pelabuhan Perikanan Strategis	W3	Sarana prasarana tidak lengkap

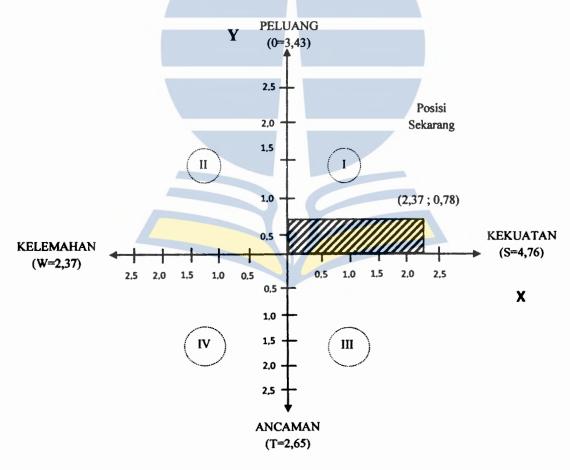
Tabel 4.21 FKK Faktor Eksternal

	AKTOR E	KSTE	RNAL
	Peluang (O)		Ancaman (T)
01	Peningkatan PAD	Tl	Ilegal fishing
02	Dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo	T2	ВВМ
О3	Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	Т3	Sistem jual beli

Tabel 4.20 dan Tabel 4.21 menjelaskan bahwa FKK yang telah diperoleh tersebut baik faktor internal dan eksternal digunakan sebagai acuan atau dasar pengambilan pada penentuan peta posisi kekuatan organisasi, penentuan tujuan, sasaran, dan strategi. Berdasarkan referensi beberapa jurnal, pemilihan FKK (1, 2 dan 3 faktor) tergantung pada kondisi pengelola pelabuhan perikana Lampulo dalam manajemennya. Apabila strategi yang ingin dicapai dalam prioritas yang cukup tinggi, maka pemilihan FKK cukup satu faktor saja yang memiliki nilai tertinggi.

3. Peta Posisi Kekuatan

Peta posisi kekuatan dapat dilihat dari Total Nilai Bobot (TNB) yang diperoleh pada Tabel 4.15, diperoleh skor kekuatan (S) yaitu 4,76 sedangkan skor kelemahan (W) adalah 2,37 sehingga bila (S - W) merupakan sumbu X, maka nilai yang didapat adalah 2,39. Untuk skor peluang (0) adalah 3,43 sedangkan skor ancaman (T) adalah 2,65 sehingga bila (0 - T) yang merupakan sumbu Y nilai yang didapat adalah 0,78. Nilai yang diperoleh menjelaskan bahwa posisi manajemen pelabuhan perikanan Lampulo berada dalam kondisi kuat (2,37), dan memiliki peluang (0,78) cukup baik dijelaskan pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Peta Posisi Kekuatan

Berdasarkan Gambar 4.6 menjelaskan bahwa pengelola pelabuhan perikanan Lampulo berada pada posisi kuadran I. Posisi ini menandakan manajemen pelabuhan perikanan yang kuat dan berpeluang berkembang membangun perikanan di Aceh. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya pengelola pelabuhan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk implementasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan perencanaan, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal untuk kemajuan pelabuhan perikanan Lampulo dimasa mendatang. FKK kekuatan internal yang diperoleh sumber daya ikan Aceh masih berpotensi baik dan bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk menambah pendapatan dan produksi ikan, selanjutnya faktor dukungan pemerintah menjadi kekuatan dalam pengembangan pelabuhan perikanan lampulo, dan letak pelabuhan perikanan strategis, serta FKK dari faktor eksternal dengan dukungan kuat dari masyarakat untuk membangun gampongnya.

H. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Pelabuhan

Berdasarkan pada tahapan perencanaan, penetapan tujuan merupakan langkah awal. Maka, merujuk basil peta kekuatan perencanaan, dimana pada saat pengelola pelabuhan perikanan lampulo berada pada kuadran I yang memiliki kekuatan dan peluang. Sehingga rumusan tujuan dan sasaran dapat dihasilkan dengan menggunakan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) kekuatan dan peluang. Rumusan tujuan dan sasaran diillustrasikan pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22 Formulasi Alternatif Strategi SWOT

FKK INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Sumber Daya Ikan Aceh masih berpotensi	Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana
	Dukungan pemerintah	Teknologi penangkapan
FKK EKTERNAL	Letak Pelabuhan Perikanan Strategis	Sarana prasarana tidak lengkap
	STRATEGI: SO	STRATEGI: WO
PELUANG (O)	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Stategi menggunakan kelemahan dengan memanfaakan peluang
Peningkatan PAD	Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD di lingkungan pelabuhan	Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
Dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo	Meningkatkan produksi	Meningkatkan penggunaan teknologi terkini
Munculnya lapangan kerja bagi masyarakat	Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD di lingkungan pelabuhan	Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
ANCAMAN (T)	STRATEGI : ST Strategi memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI: WT Stategi memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman
Ilegal fishing	Menstabilkan dan peningkatan pasokan solar	Bekerja sama dengan pihak ketiga berkaitan
ввм	Penertiban penjualan ikan di PP Lampulo	Pengembangan PP Lampulo
Sistem jual beli	Impor ikan	Penutupan PP Lampulo

Dari Tabel 4.22, diperoleh 12 (duabelas) strategi dalam empat alternatife strategi (SO, WO, ST, dan WT) pada matriks SWOT. Menurut LAN (2008) untuk memperoleh dan memilih alternatif strategi sebagai strategi prioritas, cukup memfokuskan pada strategi kuadran terpilih. LAN (2008) menyebutkan pula bahwa apabila terjadi keterbatasan biaya dan ketidakmampuan sumberdaya

manusia dalam manajemen tersebut untuk memfokuskan pada satu kuadran, maka cukup mengambil satu strategi dari empat (4) kuadran alternatif strategi (SO, WO, ST, dan WT). Apabila tidak memungkinkan juga cukup memilih salah satu strategi dalam alternatif strategi yang ada. Jika mengikuti referensi LAN (2008) maka, manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan Lampulo memiliki kondisi manajemen pada kuadran SO, artinya cukup melaksanakan strategi ekspansi sebagai strategi prioritas ke dalam bentuk program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Faktor lain yang mempengaruhi perencanaan adalah seberapa sering rencana-rencana harus ditinjau kembali dan diperbaiki. Ini terganiung pada sumber daya yang tersedia dan derajat ketetapan perencanaan manajemen. Maka dengan mengadopsi kedua referensi diatas, diambil kesimpulan bahwa perencanaan Gampong Lam Teungoh melaksanakan keduabelas (12) strategi dalam empat (4) alternatif strategi (SO, WO, ST, dan WT) sebagai rencana strategi dan acuan dalam implementasi program pembangunan gampong, namun keseluruhan strategi tersebut tetap akan dikelompokkan kedalam tahapan waktu pelaksanaan yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pengelompokkan ini hanya didasarkan pada pengetahuan dan kesimpulan selama melakukan penelitian.

Pengelompokkan strategi dalam tahapan waktu adalah sebagai berikut :

 Rencana Jangka Pendek, merupakan strategi pada kuadran terpilih yaitu alternatif strategi SO, strategi tersebut antara lain:

- a. Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD
 di lingkungan pelabuhan perikanan Lampulo
- b. Meningkatkan produksi ikan
- c. Membangun usaha-usaha penunjang perikanan sebagai peningkatan PAD
 di lingkungan pelabuhan perikana Lampulo

Dengan pertimbangan, bahwa ketiga strategi tersebut dapat dilaksanakan pada saat ini juga, dikarenakan pemanfaatan lahan menjadi produktif serta melakukan pemeliharaan dan perawatan lahan tetap terjaga, menambah MCK dan sanitasi di Gampong Lam Teungoh, yaitu pemanfaatan lahan produktif telah digunakan oleh masyarakat, dan dengan seiring waktu dapat menyusun untuk mulai merencanakan program penambahan MCK dan sanitasi gampong.

- 2. Rencana Jangka Menengah, merupakan altematif WO dan ST, strategi tersebut antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
 - b. Meningkatkan penggunaan teknologi terkini
 - c. Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UPTD Lampulo
 - d. Menstabilkan dan peningkatan pasokan solar
 - e. Penertiban penjualan ikan di PP Lampulo
 - f. Impor ikan

Dengan pertimbangan, bahwa ke enam strategi jangka menengah tersebut dapat dilaksanakan pada saat ini juga, dikarenakan belum ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di Pelabuhan Perikanan Lampulo sehingga seiring waktu

dapat menyusun untuk mulai merencanakan pembangunan dan implementasinya untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

- 3. Rencana Jangka Panjang, adalah alternatif WT, strategi tersebut antara lain:
 - a. Bekerja sama dengan pihak ketiga berkaitan.
 - b. Perkembangan PP Lampulo
 - c. Penutupan PP Lampulo

Strategi pada jangka panjang merupakan strategi hasil artinya apabila strategi pada jangka panjang pendek dan jangka panjang tidak berjalan, maka strategi pada jangka panjang ini akan mustahil untuk dilaksanakan, misalkan penutupan PP Lampulo.

Berdasarkan Tabel 4.18 menjelaskan bahwa peluang untuk meningkatkan PAD masih berpeluang. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan peningkatan sarana serta prasarana di Pelabuhan Perikanan Lampulo, sehingga akan meningkatkan mobilisasi nelayan yang melakukan aktivitas bongkar muat di ikan di pelabuhan tersebut. Faktor peluang lainnya adalah dukungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo dengan meningkatkan penyediaan alokasi dana di APBN dan APBD. Alokasi dana tersebut akan menambah pembangunan sarana dan prasarana di pelabuhan, seperti perluasan dermaga pendaratan, dermaga tambat, alur masuk, jalan kawasan pelabuhan, saluran drainase. Selanjutnya peningkatan Tempat Pelayanan Ikan (TPI), pabrik es, penyimpanan es, slipway dock, gedung bengkel, gedung pengemasan, Program Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), tangki air bersih dan pelataran

parkir. Selanjutnya peningkatan dan perawatan fasilitas penunjang yang meliputi gedung kantor administrasi, pos jaga, pertokoan, Mandi Cuci dan Kakus (MCK) umum, bak water treatment, puskesmas pembantu, tempat ibadah dan gedung balai nelayan.

Pelabuhan perikanan Lampulo telah lapangan kerja bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, toke bangku dan pekerja harian di pelabuhan. Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang dalam penunjang.

Selanjutnya faktor ancaman dengan adanya pelabuhan yaitu *Ilegal* fishing yang terjadi di sekitar laut Aceh dan sekitarnya. *Illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.

Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi ancaman disebabkan karena stok BBM di SPBN nelayan Lampulo habis. Pada waktu BBM habis nelayan membeli minyak di SPBU, hal ini menjadikan ancaman terhadap aktivitas nelayan melaut. Pada saat tidak ada minyak, nelayan tidak bisa pergi melaut sehingga mempengaruhi PAD sektor perikanan. Faktor selanjutnya menjadi ancaman adalah sistem jual beli berupa kegiatan pelalangan ikan hasil tangkapan nelayan merupakan kegiatan utama dan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dalam pelelangan ini tercakup kegiatan administrasi mulai pencacatan, penarikan retribusi dan lalin-lain yang dilakukan oleh petugas TPI, kegiatan jual beli yang melibatkan pemilik ikan/penjual dan pedagang atau pembeli yang dipraktekkan di Pelabuhan Perikanan Lampulo adalah jual beli dari toke bangku kepada pedagang dan muge ikan.

I. Pembahasan Tentang Usaha Mekanisme Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pelabuhan Perikanan Lampulo

Kawasan Pelabuhan Lampulo diharapkan potensi perikanan Aceh bisa lebih meningkat dan optimal, sehingga geliat ekonomi masyarakat nelayan semakin berkembang, sekaligus dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah disebutkan bahwa setiap daerah memiliki wewengan untuk menggali sumber-sumber penerimaan bagi daerah dan dapat digunakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh terdiri atas: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/Kota; 4) Zakat; dan 5) lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

Pelabuhanan Perikanan Lampulo sebagai salah satu sumber PAD di Provinsi Aceh. Pelabuhan tersebut dikelolah oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh ikut menyumbangkan PAD bagi pemerintah daerah Provinsi Aceh yakni melalui

pengutipan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan retribusi pemakaian kekayaan Aceh. Penerima PAD dari UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo mulai tahun 2009 s/d 2013 diperlihatkan pada Tabel 4.23.

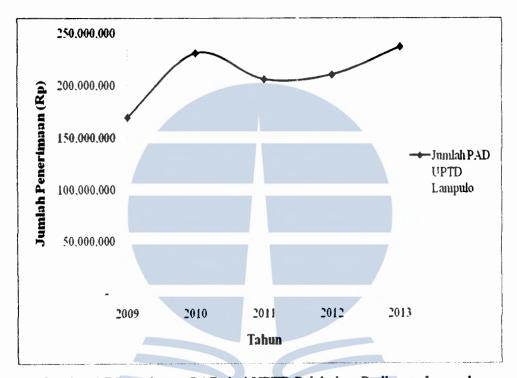
Tabel 4.23. PAD dari UPTD Lampulo

No	Tahun	Kegiatan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1	2009	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	169.228.000
2	2010	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	230.910.000
3	2011	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	166.387.500
4	20 12	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	159.194.000
5	20 13	Sewa lahan UPTD, retribusi ikan, retribusi pelayaran, sewa gedung dan pelayanan Jasa Pelabuhan	212.356.040
		Jum lah	938.075.540

Sumber: UPTD Lampulo, 2014

Berdasarkan nilai tersebut restibusi yang berasal dari pas masuk, tambat labuh, sewa gudang pengepakan dan pabrik es telah terjadi peningkatan PAD secara fluktuatif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD Lampulo didapatkan bahwa nilai retribusi pas masuk pelabuhan yang terkumpul sebulan sebesar Rp 2.000.000, selanjutnya terima jasa dari operasional pabrik es sebelun sebesar Rp 1.500.000. Dana tersebut dikumpulkan oleh UPTD kemudian dibagi dengan pelabuhan, setelah potong uang operasional maka uang tersebut disetor ke kas daerah. Keberadaan pelabuhan Lampulo mendukung meningkatkan pendapatan nelayan serta meningkatkan ekspor non migas Aceh. Kawasan

perikanan di Lampulo termasuk salah satu lokasi bisnis perikanan yang sangat strategis, baik itu ditinjau dari aspek potensi sumber daya perikanan, potensi sumber daya manusia, dan juga potensi kegiatan usaha perikanan. Penerima PAD dari UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo mulai tahun 2009 s/d 2013 diperlihatkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Penerimaan PAD dari UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo

Gambar 4.3 menjelaskan bahwa jumlah PAD tersebut terkumpul dari pelayanan jasa pelabuhan di setor ke kas daerah Aceh/Gubernur Aceh Nomor Rekening 01.02.120003-4 setiap bulannya, uang tersebut menjadi PAD Aceh pada sektor perikanan. Jumlah PAD yang terkumpul pada tahun 2009 sebesar Rp 169.288.000, pada tahun 2010 nilai PAD meningkat menjadi Rp 230.910.000; selanjutnya tahun 2011 dan 2012 nilai PAD menurun menjadi Rp 205.810.000 dan Rp 210.194.000. Pada tahun 2013, PAD yang terkumpul meningkat menjadi

Rp 236.856.040, penerimaan retribusi dari kegiatan pelabuhan perikanan Lampulo bervariasi dan pendapatannya yang fluktuatif yaitu naik turunnya uang jasa penerinamaan yang menjadi kas daerah.

Penurunan penerimaan PAD pada tahun 2011 dan 2012 terjadi karena adanya penurunan aktivitas bongkar muat di pelabuhan perikanan Lampulo disebabkan karena tingkat hasil tangkap ikan nelayan menurun. Hasil tangkap nelayan menurut disebabkan karena belum modernisasi alat tangkap dan masih tingginya illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Aceh. Faktor kedua adalah kapal ikan (nelayan) tidak melaut pada waktu tertentu disebabkan oleh cuaca dan perubahan iklim. Peningkatan PAD pada tahun 2013 disebabkan karena bertambahnya armada perikanan yang melakukan bongkat muat di pelabuhan Lampulo. Akibatnya meningkatnya produksi ikan dan aktivitas di pelabuhan telah meningkatkan jasa sewa lahan UPTD Lampulo, jasa retribusi ikan, jasa retribusi pelayaran, jasa sewa gedung dan jasa pelayanan sehingga telah berdampak meningkatnya penerimaan PAD pada sektor perikanan. Jenis penerimaan PAD tahun 2013 bersumber dari sewa lahan UPTD Lampulo sebesar Rp 67.363.520,- retribusi pelayanan sebesar Rp 47.000.000, retribusi ikan Lampulo sebesar Rp 41.968.520.

J. Strategi Peningkatan PAD Pelabuhan Perikanan Lampulo

Strategi peningkatan PAD yang bersumber dari Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkaran sarana serta prasarana Pelabuhan Perikanan Lampulo, yaitu:

- Peningkatan status UPTD Lampulo sebagai unit kerja yang berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
- Penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo.
- Mayoritas nelayan Aceh dalam kategori masyarakat miskin sehingga pemerintah memberikan bantuan kapal perikanan dan alat tangkap kepada nelayan yang membutuhkan.
- Peran aktif nelayan serta polisi Airud untuk lebih intensif memantau illegal fishing, unregulated dan unreported fishing di perairan barat Aceh.
- Peningkatan armada perikanan tangkap dari konvensional (skala kecil dan tradisional) menjadi modern.
- 6. Pembangunan Industri pengolahan hasil perikanan di Komplek Pelabuhan Perikanan Lampulo.
- 7. Peningkatan SDM pengelola Pelabuhan Perikanan Lampulo.
- Pelaksanaan fisik pengerukan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Lampulo supaya kapal dapat berlabuh di pelabuhan tersebut.
- Pelaksanaan fisik pembangunan Break Water Pelabuhan Perikanan Lampulo
 Kota Banda Aceh.

K. Perbandingan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo dengan Pelabuhan Perikanan Lainnya

Hasil penelitian menunjukkan Pelabuhan Perikanan Lampulo pengelolaannya telah baik dan tingkat kekuatan berada pada kuadran I. Perbandingannya diperlihatkan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Perbandingan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo

No	Pelabuhan Perikanan Lampulo	Pelabuhan Perikanan Lainnya
1	Dasar Hukum Pengelolaannya: Undang- Undang No: 45 Tahun 2009, tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Permen DKP Nomor: 16 Tahun 2006 ttg Pelabuhan Perikanan	Pada tahun 2007 sampai pertengahan 2012 hasil produksi dan nilai produksi Tempat Pelelangan Ikan terus mengalami penurunan yang signifikan sebesar 5% sampai 7% dari tahun ke tahunnya, ini dikarenakan beberapa faktor seperti : alat tangkap ikan yang sudah mulai rusak, kapal nelayan yang telah dimakan usia, banyak para nelayan yang menjual ikan ditengah laut, fasilitas penunjang pelabuhan terhadap nelayan yang kurang memadai, musim dan faktor cuaca yang paling berpengaruh terhadap hasil tangkap ikan.
2	Pengelola pelabuhan perikanan Lampulo berdasarkan analisis SWOT berada pada posisi kuadran I. Posisi ini menandakan manajemen pelabuhan perikanan yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya pengelola pelabuhan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk implementasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan perencanaan, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal untuk kemajuan pelabuhan perikanan Lampulo dimasa mendatang.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas antara lain: Identifikasi SWOT di PPP Sungai Rengas meliputi: (1) Kekuatan: Potensi sumber daya ikan, Pelabuhan yang aman dari gelombang, Dukungan pemerintah, Luas lahan PPP, Jarak pasar lokal dan internasional, Pengembangan yang tidak terbatas. (2) Kelemahan: Kualitas sumber daya manusia, Fasilitas PPP Sungai Rengas, sistem lelang, keamanan, Sanitasi, mutu ikan (3) Peluang: Distribusi, Konsumsi, Peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan mutu ikan, usaha penunjang (4) Ancaman: BBM, Cuaca, Musim ikan, Ilegal fishing, Teknologi.
3	Qanun Perikanan (Ps 63 No.7/2010) Pelabuhan Perikanan Besar, Menengah, Kecil (Pem Prov, Pemkab/Kota Mengakui Pelabuhan Perikanan Rakyat). Gubernur Mengklasifikasi lebih lanjut UPTD Lampulo berdiri sendiri dan Otonom, tidak lagi berada dbawah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.	Fasilitas sarana dan prasarana pokok dan fungsional PPI Banyutowo yang harus ada, telah tersedia / terpenuhi sebanyak 80 % dan hanya 20 % yang belum terpenuhi sehingga perlu untuk dikembangkan. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung, baru terpenuhi 62,50%, oleh karena itu pengembangannya sangat mendesak untuk dilaksanakan.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka didapat beberapa kesimpulan yang berkenaan hasil-hasil pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penerimaan jasa Pelabuhan Perikanan Lampulo yang berasal dari pas masuk, tambat labuh, sewa gudang pengepakan dan pabrik es telah meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor perikanan. PAD tahun 2009 sebesar Rp 169.228.000, tahun 2010 meningkat menjadi Rp 230.910.000, tahun 2011 dan 2012 menurun menjadi Rp 205.810.000; Rp 210.194.000, tahun 2013 kembali meningkat menjadi Rp 236.856.040.
- 2. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh guna memaksimalkan tata kelola Pelabuhan Perikanan Lampulo dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Aceh dan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, membangun Pelabuhan Utama (Pelabuhan Perikanan Besar setingkat PPS/PPN) sebagai Growth Center Utama (dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Aceh), membangun Pelabuhan Perikanan Pendukung (Pelabuhan Perikanan Menengah setingkat PPP) sebagai Growth Center Pendukung.
- Pelabuhan perikanan Lampulo telah memberi pengaruh positif terhadap sosial dan ekonomi masayarakat Banda Aceh dan Aceh yaitu adanya lowongan kerja bagi masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya.

4. Berdasarkan analisis SWOT, pengelola pelabuhan perikanan Lampulo berada pada posisi kuadran I. Posisi ini menandakan manajemen pelabuhan perikanan yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya pengelola pelabuhan dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk implementasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan perencanaan, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal untuk kemajuan pelabuhan perikanan Lampulo dimasa mendatang.

B. Saran

Menyarankan kepada UPTD Pelabuhan Lampulo perlu ditata kembali manajemen pengelolaan pelabuhan, kemudian perlu dilengkapi sarana dan prasarana serta mudah diakses oleh pemakai jasa. Pengembangan pelabuhan kedepan perlu membuka kran investor supaya menanamkan modalnya, serta perlu perhatian pemerintah pusat dan daerah baik material dan non material.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2013, Rencana Induk Pelabuhan Aceh, Dinas Perhubungan Komunikaso Informasi dan Telekomunikasi Aceh.
- Almutahar, A.M, dkk, 2013, Analisis Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat, PS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, PSPK Student Journal, Vol.I No. 1 pp-1-10 Universitas Brawijaya.
- Arsyad, L, 1992, Ekonomi Pembangunan Edisi ke-2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, dalam Dinar Ayuningrum dan Santy Paulla Dewi, 2013, Pengaruh Program Desa Vakasi Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Jurnal Teknik PWK Volume 2 Nomor 2 Volume 1 Tahun 2013, Halaman 76.
- Azis. J, 2010, Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim, PT. Gramedia, Jakarta.
- Azis, K. A, M, dkk, 1989, Potensi Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB dan Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Perikanan Laut. Jakarta. Dalam Gullad, J.A, 1975, Manual of Methods for Fsheries Resources Survey ad Apprasial, Part 5. Objectives and Basis Methods. FAO Fisheries Technical Paper No. 145. FAO, Rome.
- Bambang M, 1992. Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Indonesia. Presentasi Makalah pada Studi Seminar Implementasi Nusantara di Bidang Perikanan. Biotrop Bogor. 14-15 Desember 1992.
- BPS Banda Aceh, 2011. Banda Aceh Dalam Angka, Banda Aceh.
- Hadi, SP. 2002, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Dipenogoro, Semerang.
- Jhingan, M.L, 2008, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo, 20012. Laporan Tahunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Banda Aceh.
- LIPI, Ditjenkan, PPPP, PPPO, Balai Penelitian Perikanan Laut. Puslitbangkan. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Fakultas Perikanan IPB. Potensi dan Penyebaran

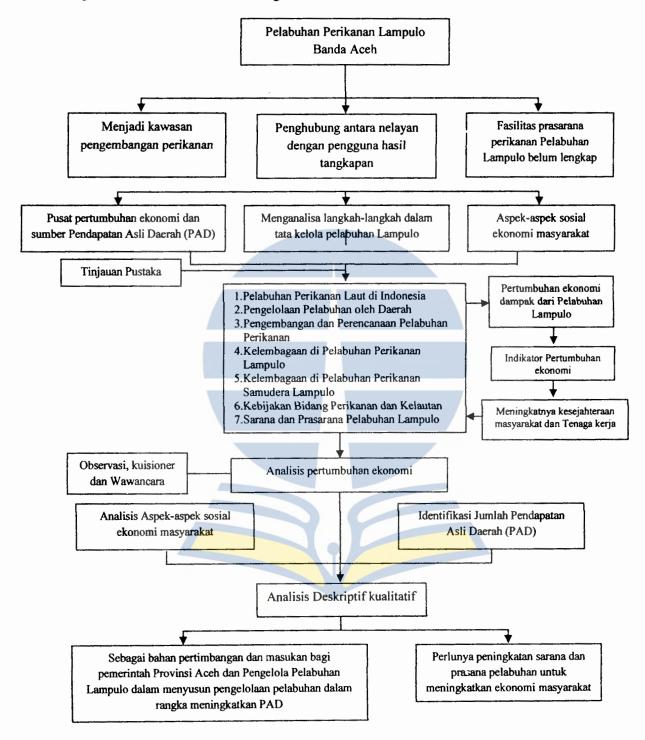
- Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia. 1998. Komisi Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Laut. Halaman 249.
- Najamuddin, 2011, Buku Ajar Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nurhafni, 2012, Analisis Manajemen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional (Studi Kasus: TP A Sampah Terpadu Blang Bintang), Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Nijijuluw, 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pustaka CIndesidor, Jakarta, Halaman 254.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), 2008, Teknik-Teknik Analisis Manajemen (TAM), Modul DiklatPIM Tingkat III, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan.
- Orcullo. NA, 2007, Fundamentals of Strategic Management, Rex Printing Company. Inc, P. Florentino St, Sta. Mesa Heihts Quezon City, Fhiliphina.
- Sukirno, S. 2005, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sam S, 1992, 1992. Perikanan Tuna Longline di Indonesia. PT Perikanan Samudera Besar. Jakarta.
- Salusu, 1996. Statistika dan Sistem Informasi untuk Pimpinan. Erlangga, Jakarta.
- Sudjana, 2000, Metode Statistika, Tarsito, Bandung.
- Retnowati. E, 2011, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB).
- Rionto C.D, 2012, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan, Program Magister Ilmu Perikanan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr
- Tri, M, 2010, Kajian Pengaruh Aktivitas Pelabuhan Perikanan Terhadap Aspek Kualitas Air Sungai Juwana dan Persepsi Masyarakat (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati), Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Kandi. O, 2005, Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

www.jugglingart.org

Zamawardi, I, 2000, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Indonesia; Telaah Ekonomi Nelayan dan Petani Tambak. Dalam Indonesia Menapak Abad Ke-21: Kajian Ekonomi Politik. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.





Lampiran A.3.1 Flow Chat Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

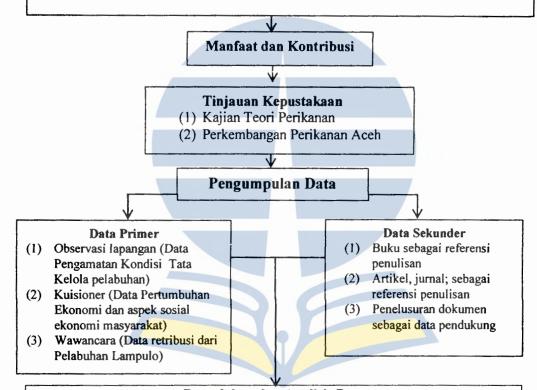
Sumber: Hasil Interretasi Penyusun Tahun 2014

Lampiran A.3.2 Flow Chat Tahap Penelitian



Perumusan Masalah

- (1) Menjadi kawasan pengembangan perikanan
- (2) Penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil tangkapan
- (3) Fasilitas prasarana pelabuhan perikanan Lampulo belum lengkap
- (4) Pusat pertumbuhan ekonomi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (5) Aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat



Pengolahan dan Analisis Data			
Metode	Hasil		
(1) Analisis Deskriptif kualitatif	 Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Aceh dan Pengelola Pelabuhan Lampulo dalam menyusun pengelolaan pelabuhan dalam rangka meningkatkan PAD Adanya analisa langkah-langkah yang harus ditempuh guna memaksimalkan tata kelola pelabuhan lampulo. Perlunya peningkatan sarana dan prasana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 		



Gambar 3.2 Bagan Alir Metode Penelitian

LAMPIRAN A.3.3 KUISIONER PENELITIAN



PENELITIAN PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA - 2013

Kuisioner ini dilakukan untuk memperoleh data yang menunjang bagi penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data ini dibutuhkan semata-mata untuk kepentingan studi, dan kami sanggup menjaga kerahasiaan setiap data diberikan. Mohon kiranya memberi keterangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada bagian yang menurut Anda perlu dikomentari, tulislah komentar anda pada bagian kertas yang kosong. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

1. IDENTITAS RESPONDEN

1	No. Urut Kuesioner	4.
2	Nama / Umur	/ Tahun
3	Jenis Kelamin	Laki-Laki/Perempuan
4	Jumlah Anggota Keluarga	Orang
5	Pekerjaan tetap	
6	Pekerjaan sampingan	
7	Jumlah Pendapatan	Rp(perhari/minggu/bulan)
8	Pendidikan Terakhir	
9	Gampong/Kec/Kota/Kab	
10	Jumlah anak kuliah/lulus PT	Orang
11	Menetap di Gampong ini sejak	Lahir : tahun; Pendatang tahun

Petunjuk pengisian: Jawablah pertanyaan berikut ini dengan melingkari jawaban yang menurut saudara paling benar.

PETUNJUK:

- 1. Isilah jawaban dengan benar dan jelas, sesuai dengan kondisi responden.
- 2. Jika terhadap ketidakjelasan dan mempunyai pertanyaan lebih lanjut dapat ditanyakan secara langsung pada peneliti.

2. MEKANISME PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO

2.1 MANAJEMEN PELABUHAN LAMPULO

1	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kelembagaan	1. Baik
	pengelola pelabuhan Lampulo?	2. Kurang Baik
		3. Tidak Baik
2	Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusa pengelola	1. Baik
	pelabuhan Lampulo?	2. Kurang Baik
		3. Tidak Baik
3	Apakah ada program perencanaan pembangunanan	1. Ya
	pelabuhan Lampulo jangka menengah dan panjang?	2. Tidak
		3. Tidak pernah
4	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang cara pelayanan	1. Ya
	Pelabuhan Lampulo saat ini?	2. Tidak
		3. Tidak pernah
5	Bagaimana perhatian pemerintah Pusat dan Pemerintah	3. Tidak pernah 1. Sering
5	Bagaimana perhatian pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap pelabuhan Lampulo?	
5	Aceh terhadap pelabuhan Lampulo?	Sering Kadang-kadang Tidak pernah
5		Sering Kadang-kadang Tidak pernah
	Aceh terhadap pelabuhan Lampulo?	Sering Kadang-kadang Tidak pernah

2.2 PRASARANA PELABUHAN LAMPULO

1	Apakah sarana dan prasarana Pelabuhan Lampulo	 Sudah Lengkap
	sudah lengkap?	Belum Lengkap
		3. Tidak Lengkap
2	Apakah sarana dan prasarana tersebut dengan mudah	1. Ya
	diakses oleh masyarakat umum, nelayan, muge ikan dan	2. Tidak
	investor?	3. Tidak tahu
3	Apakah sarana dan prasarana tersebut mampu memenuhi	1. Ya cukup
	kebutuhan pelayanan Pelabuhan Lampulo?	2. Tidak cukup
	•	3. Tidak tahu
4	Apakah sarana unium seperti mushalla dan MCK	1. Ya cukup
	mendapatkan air bersih dari PDAM?	2. Belum memadai
	•	3. Tidak ada
5	Apakah ada pengendalian dalam pemanfaatan sarana	1. Ya ada

	dan prasana pelabuhan Lampulo tersebut oleh	2. Belum memadai
	Pengelola?	3. Tidak ada
6	Apakah rutin dilakukan pemeliharaan terhadap sarana da	1. Ya ada
	prasarana Pelabuhan Lampulo tersebut?	2. Belum memadai
	-	3. Tidak ada

2.3 RETRIBUSI PPS LAMPULO

1	Apakah retribusi dari Pelabuhan Lampulo telah	1. Ya
	meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)?	2. Belum memadai
		3. Tidak ada
2	Berapa retribusi sehari di Pelabuhan Lampulo?	1. Kurang 5 Juta
		2. 5 Juta
		3. Lebih 5 Juta
3	Berapa retribusi sebulan di Pelabuhan Lampulo?	1. Kurang 30 Juta
		2. 30 Juta
		3. Lebih 30 Juta
4	Berapa retribusi setahun di Pelabuhan Lampulo?	1. Kurang 360 Jt
1		2. 360 Jt
ŀ		3. Lebih 360 Jt
5	Biaya retribusi yang terkumpul tersebut, berapa % yang	1. 100 %
	menjadi PAD daerah?	2. 75 %
	·	3. 50%
6	Bagaimana pembagian retribusi telah diatur dalam	1. Ya
	SOP pengelola pelabuhan Lampulo	2. Belum memadai
		3. Tidak ada

3. ASPEK SOSIAL EKONOMI PELABUHAN LAMPULO

3.1 SOSIAL

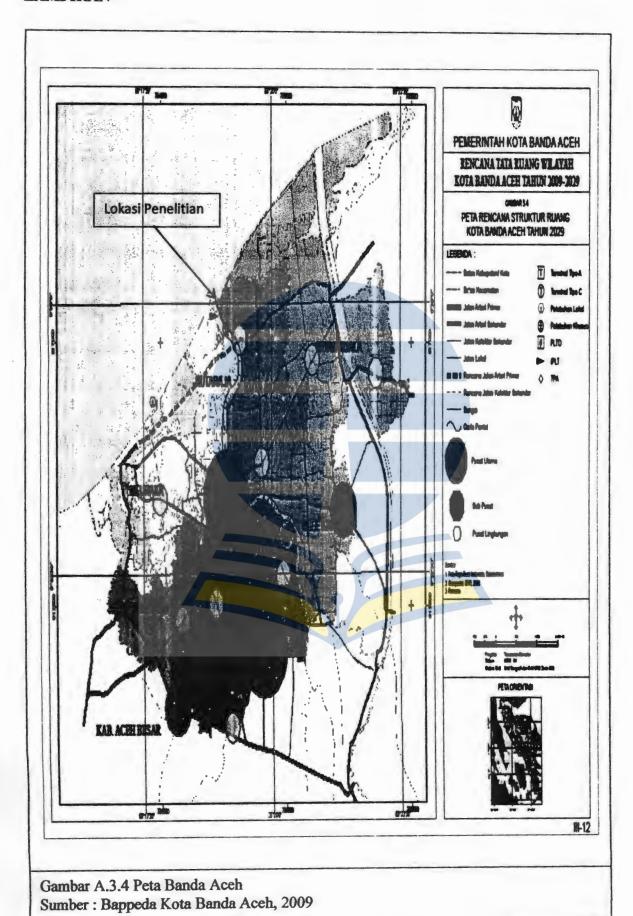
1	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang aspek social	1. Baik
	masyarakat nelayan di Pelabuhan Lampulo saat ini?	2. Kurang Baik
	•	3. Tidak Baik
2	Apakah mudah berurusan dengan pengelola pelabuhan	1. Mudah
	Pelabuhan Lampulo?	2. Rumit
	•	3. Tidak
3	Apakah terjadi interaksi sosial antara pengelola, nelayan,	1. Ada
	investor dan masyarakat di PelabuhanLampulo?	2. Pernah ada
		3. Tidak ada
4	Bagaimana hubungan dinas kelautan dan perikanan	1. Baik
	dengan pengelola Pelabuhan Lampulo	2. Kurang Baik
-		3 Tidak Baik

5	Bagaimana hubungan pengelola Pelabuhan Lampulo	1. Baik
	dengan masyarakat Gampong Lampulo dan sekitarnya	2. Kurang Baik
		2. Tidak Baik

3.2 EKONOMI

1	Apakah dengan Keberadaan Pelabuhan Lampulo	1. Ya
	berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi	2. Kadang-kadang
	masyarakat?	3. Tidak pernah
2		1. Jual langsung ke
	Lampulo antara pembeli dengan penjual?	Pedagang/ Muge
		2. Melalui agen
		Melalui toke bangkı
3	Berapa setiap hari nilai uang yang beredar di Pelabuhan	1. > 1 Milyar
	Lampulo?	2. 1 Milyar
	:	2. < 1 Milyar
4	Apakah nilai jual ikan di Pelabuhan Lampulo harganya	1. Ya
	mengikuti perkembangan pasar	2. Kadang-kadang
		3 Tidak
5	Bagaimana hubungan nelayan dengan pedagang, nelayan	1. Baik
	dengan toke bangku, nelayan dengan pengelola Pelabuha	2. Kurang Baik
	Lampulo?	2. Tidak Tidak
6	Berapa pendapatan nelayan sekali melaut di Pelabuhan	1. >Rp 3 Juta
	Lampulo	2. Rp 2 Juta
		2. < Rp 1 Juta
7	Berapa pendapatan pedagang ikan yang berjualan di	1. >Rp 3 Juta
	Pelabuhan Lampulo satu hari	2. Rp 2 Juta
		2. < Rp 1 Juta

LAMPIRAN



118